



Pemerintah Provinsi Sumatera Barat

PERUBAHAN RENCANA KERJA TAHUN 2025



**BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
PROVINSI SUMATERA BARAT**

Jalan Khatib Sulaiman No. 1
Padang-Sumatera Barat



GUBERNUR SUMATERA BARAT
KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA BARAT
NOMOR : 050-507-2025

TENTANG
PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025

GUBERNUR SUMATERA BARAT,

- Menimbang : a. bahwa dengan adanya perubahan terhadap Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025 yang ditetapkan dengan Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 11 Tahun 2025 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025, perlu dilakukan penyesuaian kembali terhadap Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2025;
- b. bahwa penyesuaian terhadap Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2025 sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dilakukan berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja Perangkat Daerah sampai dengan Triwulan I Tahun 2025;
- c. bahwa sesuai ketentuan Pasal 367 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, menyatakan bahwa Rencana Kerja Perangkat Daerah ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2025;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2022 tentang Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 160, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6806);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
6. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
8. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 128), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 191);
9. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 4 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2024 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 220) ;
10. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 11 Tahun 2025 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2025, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU terdiri dari:

1. Perubahan Rencana Kerja Dinas Pendidikan;
2. Perubahan Rencana Kerja Dinas Kesehatan;
3. Perubahan Rencana Kerja Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang;
4. Perubahan Rencana Kerja Dinas Sumber Daya Air dan Bina Konstruksi;
5. Perubahan Rencana Kerja Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan;
6. Perubahan Rencana Kerja Satuan Polisi Pamong Praja;
7. Perubahan Rencana Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah; dan
8. Perubahan Rencana Kerja Dinas Sosial;
9. Perubahan Rencana Kerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
10. Perubahan Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
11. Perubahan Rencana Kerja Dinas Pangan;
12. Perubahan Rencana Kerja Dinas Lingkungan Hidup;
13. Perubahan Rencana Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
14. Perubahan Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
15. Perubahan Rencana Kerja Dinas Perhubungan;
16. Perubahan Rencana Kerja Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik;
17. Perubahan Rencana Kerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah;
18. Perubahan Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
19. Perubahan Rencana Kerja Dinas Pemuda dan Olahraga;
20. Perubahan Rencana Kerja Dinas Kebudayaan;
21. Perubahan Rencana Kerja Dinas Kearsipan dan Perpustakaan;
22. Perubahan Rencana Kerja Dinas Kelautan dan Perikanan;
23. Perubahan Rencana Kerja Dinas Pariwisata;
24. Perubahan Rencana Kerja Dinas Perkebunan, Tanaman Pangan dan Holtikultura;

25. Perubahan Rencana Kerja Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan;
26. Perubahan Rencana Kerja Dinas Kehutanan;
27. Perubahan Rencana Kerja Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral;
28. Perubahan Rencana Kerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan;
29. Perubahan Rencana Sekretariat Daerah
30. Perubahan Rencana Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
31. Perubahan Rencana Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
32. Perubahan Rencana Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah;
33. Perubahan Rencana Kerja Badan Pendapatan Daerah;
34. Perubahan Rencana Kerja Badan Kepegawaian Daerah;
35. Perubahan Rencana Kerja Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia;
36. Perubahan Rencana Kerja Badan Penelitian dan Pengembangan;
37. Perubahan Rencana Kerja Badan Penghubung;
38. Perubahan Rencana Kerja Inspektorat Daerah; dan
39. Perubahan Rencana Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.

KETIGA : Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU menjadi pedoman dalam menyusun Perubahan Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Padang
pada tanggal 27 Agustus 2025

GUBERNUR SUMATERA BARAT,



Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Barat selaku Ketua TAPD;
2. Anggota Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Provinsi Sumatera Barat;
3. Kepala Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Barat.

LAMPIRAN 31
KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA BARAT
NOMOR 050-507-2025
TANGGAL 27 AGUSTUS 2025
TENTANG
PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT
DAERAH TAHUN 2025

PERUBAHAN RENCANA KERJA
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2025

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iii
 BAB I PENDAHULUAN	 1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Landasan Hukum	4
1.3 Maksud dan Tujuan	7
1.4 Sistematika Penulisan.....	7
 BAB II EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2025	 8
2.1 Capaian Indikator Kinerja Sasaran Strategis Sampai Triwulan II Tahun 2025	 8
2.2 Evaluasi Pelaksanaan Renja sampai Triwulan II Tahun 2025 ..	10
2.3 Analisis Gambaran Kinerja Pelayanan Bappeda	16
2.4 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Bappeda ...	19
2.5 Review Terhadap Rancangan Perubahan RKPD Tahun 2025	24
2.6 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat	31
 BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH	 32
3.1 Tujuan dan Sasaran	32
3.2 Rencana Kerja dan Pendanaan pada Perubahan Renja Tahun 2025	 34
 BAB IV PENUTUP	 45
4.1 Kesimpulan Penting Substansial	45
4.2 Kaidah-Kaidah Pelaksanaan	45
4.3 Rencana Tindak Lanjut	45

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Capaian Indikator Kinerja Sampai Triwulan II Tahun 2025	8
Tabel 2.2	Evaluasi Renja Bappeda Triwulan II Tahun 2025	12
Tabel 2.3	Pencapaian Kinerja Pelayanan Bappeda Provinsi Sumatera Barat	18
Tabel 2.4	Pemetaan Masalah Pokok, Masalah dan Akar Masalah Pada Bappeda Provinsi Sumatera Barat	20
Tabel 2.5	Tabel Permasalahan dan Isu Strategis	23
Tabel 2.6	Reviu Terhadap Rancangan Perubahan RKPD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025	25
Tabel 2.7	Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2025 Pada Bappeda Provinsi Sumatera Barat	31
Tabel 3.1	Target Tujuan dan Sasaran Perubahan Renja Tahun 2025	33
Tabel 3.2	Perubahan Rencana Kerja Bappeda Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025	35

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun. Undang-undang No 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mengamanatkan Perangkat Daerah untuk menyusun Renja Perangkat Daerah sebagai pedoman kerja selama periode 1 (satu) tahun yang merupakan terjemahan dari perencanaan strategis lima tahunan yang dituangkan dalam Rencana Strategis Perangkat Daerah ke dalam perencanaan tahunan yang sifatnya lebih operasional.

Sebagai dokumen Perangkat Daerah, Renja mempunyai kedudukan strategis dalam menjembatani perencanaan Perangkat Daerah dengan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) yang merupakan implementasi pelaksanaan strategis jangka menengah (RPJMD) dan Renstra Perangkat Daerah yang menjadi satu kesatuan untuk mendukung pencapaian Visi dan Misi Daerah.

Berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Renja dapat dilakukan perubahan. Sebagaimana tertulis pada Pasal 343 ayat (1) bahwa perubahan RKPD dan Renja Perangkat Daerah dapat dilakukan apabila berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaannya dalam tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan yang meliputi :

1. Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi prioritas pembangunan daerah, kerangka ekonomi daerah dan keuangan daerah, rencana program dan kegiatan RKPD berkenaan; dan/atau
2. Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan.

Selanjutnya pada Pasal 360 ayat (2) disebutkan Penyusunan rancangan Perubahan Renja Perangkat Daerah dapat dilakukan setelah Perangkat Daerah menerima surat edaran Kepala Daerah tentang Pedoman Penyusunan Perubahan Renja Perangkat Daerah dan pada ayat (3) disebutkan Penyusunan rancangan perubahan Renja Perangkat Daerah berpedoman pada :

1. Rancangan Perubahan RKPD; dan
2. Hasil pengendalian pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Provinsi, Kabupaten/Kota sampai dengan Triwulan II Tahun berkenaan.

Berdasarkan hasil evaluasi tahun berjalan, maka Perubahan Renja Bappeda Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025 dilakukan dengan alasan :

1. Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi prioritas pembangunan daerah

Berdasarkan capaian tahun 2024 serta memperhatikan capaian perkembangan pelaksanaan pembangunan Tahun 2025, maka terdapat beberapa target yang perlu dilakukan penyesuaian, hal ini untuk menjaga agar pelaksanaan dan hasil pembangunan dapat berkualitas.

2. Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi keuangan daerah.

Terdapat kebijakan efisiensi APBD Tahun 2025 dengan dikeluarkannya Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2025, yang diikuti dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 29 Tahun 2025 tentang Penyesuaian Rincian Alokasi Transfer ke Daerah (TKD) Menurut Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun 2025 Dalam Rangka Efisiensi Belanja Dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2025 serta Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 900/833/SJ tanggal 23 Februari 2025 tentang Penyesuaian Pendapatan dan Efisiensi Belanja daerah dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 mengakibatkan adanya efisiensi Belanja dan Penyesuaian Pendapatan dalam APBD Tahun 2025 yang diakomodir pada Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 29 Tahun 2024 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.

Berdasarkan ketentuan sebagaimana yang telah diuraikan diatas, maka Bappeda Provinsi Sumatera Barat sesuai dengan Surat Edaran Gubernur Nomor : 050/78/IV/P2EPD/Bappeda-2025 tanggal 11 April 2025 tentang Penyusunan Perubahan Rancangan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2025, melakukan penyusunan Rancangan Perubahan Renja Tahun 2025 yang pada akhirnya nanti digunakan sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja Perubahan Anggaran (RKPA) Perangkat Daerah untuk penyusunan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD-P), dengan arah kebijakan sebagai berikut :

1. Penyesuaian target kinerja indikator kegiatan dan sub kegiatan tahun 2025
2. Pergeseran, penambahan dan pengurangan anggaran belanja pada program, kegiatan dan sub kegiatan.
3. Evaluasi pelaksanaan Renja triwulan I Tahun 2025

1.1.1. Keterkaitan antara Renja Perangkat Daerah dan RKPD

Sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan, penyusunan Renja salah satunya berpedoman kepada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Selain itu dalam Pasal 78 ayat 1 huruf (d) Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 disebutkan bahwa penyusunan rancangan awal RKPD mencakup penelaahan rancangan awal Renja Perangkat Daerah. Ini artinya antara Renja dan RKPD merupakan satu entitas yang saling melengkapi dimana penyusunan Renja berpedoman kepada RKPD, sementara penyusunan Ranwal RKPD mencakup penelaahan terhadap Ranwal Renja Perangkat Daerah. Oleh karena itu penyusunan Perubahan Renja Bappeda Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025 berpedoman kepada Perubahan RKPD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025.

1.1.2. Keterkaitan antara Renja Perangkat Daerah dan Renstra Perangkat Daerah

Selain berpedoman kepada Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD), dokumen Renja Perangkat Daerah juga berpedoman kepada Rencana Strategis Perangkat Daerah. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat dengan Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai dalam kurun waktu 1–5 tahun yang berhubungan dengan tugas pokok fungsi perangkat daerah serta disusun dengan memperhitungkan perkembangan lingkungan strategis. Dalam Permendagri Nomor 86 Tahun 2017, disebutkan dengan tegas bahwa

sasaran Renstra perangkat daerah dan sasaran Renja perangkat daerah, merupakan dasar penilaian sistem akuntabilitas kinerja instansi perangkat daerah. Ini artinya harus terdapat kesesuaian antara dokumen Renstra dengan dokumen Renja Perangkat Daerah khususnya dalam hal sasaran sebagai dasar dalam penilaian SAKIP perangkat daerah. Oleh karena itu penyusunan Perubahan Renja Bappeda Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025 juga berpedoman kepada Rancangan Rencana Strategis Bappeda Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025-2029.

1.1.3. Renja dan Tindak Lanjut dalam APBD

Perubahan Renja Bappeda Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025 merupakan pedoman dalam penyusunan Perubahan Rencana Kerja dan Anggaran (P-RKA) Bappeda Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025. Sedangkan Perubahan RKA Bappeda Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025 merupakan salah satu dasar yang digunakan dalam penyusunan Perubahan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) yang kemudian disahkan sebagai dokumen Perubahan APBD Provinsi Sumatera Barat. Oleh karena itu Renja merupakan salah satu dokumen penting untuk kemudian ditindaklanjuti dalam Perubahan APBD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025.

1.2. Landasan Hukum

Landasan hukum penyusunan perubahan Renja Bappeda Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025, adalah :

1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004, tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2022 tentang Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Tahun 2022 Nomor 160, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6806);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Internal Pemerintah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323)
9. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, tentang Tata cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah;

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025;
14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2008 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Sumatera Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2018 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7);
16. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026;
17. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 4 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2024 Nomor 4, Noreg Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat : 4-269/2024);
18. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
19. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 29 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2023 Nomor 29);
20. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 6 Tahun 2025 Tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 29 Tahun 2024 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
21. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 11 Tahun 2025 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025.

1.3. Maksud Dan Tujuan

Maksud penyusunan Perubahan Renja Bappeda Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025 adalah memberikan pedoman dalam melaksanakan program dan kegiatan triwulan berikutnya berdasarkan hasil evaluasi kegiatan sampai dengan triwulan II tahun 2025 yang menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan asumsi kerangka ekonomi daerah dan kerangka pendanaan, prioritas dan sasaran pembangunan, rencana program dan kegiatan prioritas daerah.

Sedangkan tujuan penyusunan Perubahan Renja Bappeda Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025 sebagai berikut :

1. Merumuskan program, kegiatan dan sub kegiatan pembangunan sebagai bagian pelaksanaan tugas dan fungsi Bappeda Provinsi Sumatera Barat sesuai dengan amanat Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2025, yang akan menjadi dasar penyusunan Perubahan Kebijakan Umum Anggaran (P-KUA), dan Perubahan Prioritas dan Plafonisasi Anggaran Sementara (P-PPAS) Tahun 2025.
2. Menjamin pencapaian target kinerja sasaran Bappeda melalui penyesuaian perencanaan substansi kegiatan, sub kegiatan dan penganggaran.

1.4. Sistematika Penulisan

Perubahan Renja Bappeda Provinsi Sumatera Barat tahun 2025 disusun berdasarkan sistematika penulisan sebagai berikut :

BAB I Pendahuluan

memuat latar belakang perubahan Renja, dasar hukum penyusunan, maksud dan tujuan serta sistematika penyusunan perubahan Renja berdasarkan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017;

BAB II Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja sampai dengan Triwulan II

memuat penjelasan tentang pelaksanaan Renja sampai dengan triwulan II Tahun 2025, analisis gambaran pelayanan Bappeda, dan penentuan isu penitng penyelenggaraan tugas dan fungsi Bappeda;

BAB III Rencana Kerja dan Pendanaan

memuat rencana program dan kegiatan prioritas daerah yang mengalami perubahan berdasarkan evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah sampai dengan triwulan II Tahun 2025;

BAB IV Penutup

Memuat kaidah-kaidah pelaksanaan Perubahan Renja dan rencana tindak lanjutnya.

BAB II

EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2025

Berdasarkan pasal 343 ayat 1 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, menyatakan bahwa Perubahan Renja Tahun 2025 dapat dilakukan apabila berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaannya dalam tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan. Berdasarkan hal tersebut, maka Bappeda Provinsi Sumatera Barat melakukan Perubahan terhadap Renja Tahun 2025. Pada Bab ini akan diuraikan hasil evaluasi terhadap capaian pelaksanaan Renja Renja Tahun 2025 sampai dengan triwulan II.

2.1 Capaian Indikator Kinerja Sasaran Strategis Sampai Triwulan II Tahun 2025

Capaian indikator kinerja yang telah diperjanjikan sesuai dengan Perjanjian Kinerja Tahun 2025 antara Kepala Bappeda Provinsi Sumatera Barat dengan Gubernur Sumatera Barat hingga Triwulan II Tahun 2025 tergambar pada tabel berikut :

Tabel 2.1 Capaian Indikator Kinerja Sampai Triwulan II Tahun 2025

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1	Meningkatnya Kualitas Perencanaa	Indeks Kualitas Perencanaan	95	40,77	42,92%
2	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Organisasi	Nilai Akuntabilitas Kinerja OPD	84,25	Masih tahap evaluasi oleh Inspektorat	-
3	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Organisasi	Tingkat Kepuasan Terhadap Pelayanan Organisasi	98	92,16	94,04%

Dari tabel diatas dapat diketahui, hingga akhir triwulan II Tahun 2025, kinerja Bappeda Provinsi Sumatera Barat yang diukur melalui 3 sasaran dengan masing-masing indikator kinerja dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Sasaran Strategis 1 Meningkatkan Kualitas Perencanaan dengan persentase capaian kinerja sampai triwulan II Tahun 2025 sebesar 42,92%. Capaian kinerja sasaran strategis ini diukur melalui 1 (satu) indikator kinerja yaitu Indeks Kualitas Perencanaan dengan target tahun 2025 sebesar 95% dan terealisasi sampai triwulan II sebesar 40,77%. Capaian ini didapat dari setiap tahapan perencanaan yang dilakukan oleh Bappeda Provinsi Sumatera Barat yang terdiri atas 3 dimensi yaitu 1) Dimensi Proses, 2) Dimensi Isi, dan 3) Dimensi Tindak Lanjut. Sampai dengan triwulan II Tahun 2025, dimensi yang telah dilakukan pentahapannya adalah Dimensi Proses dengan realisasi sebesar 24,71%, Dimensi Isi dengan realisasi sebesar 15% dan Dimensi Tindak Lanjut dengan realisasi sebesar 1,07%. Realisasi sampai dengan triwulan II tahun 2025 belum mencapai target yang diharapkan yaitu sebesar 50%, dimana terdapat beberapa faktor penghambat yaitu :
 - a. Belum semua Perangkat Daerah yang melaksanakan Forum OPD dalam rangka penyusunan rencana kerja tahun 2026. Berdasarkan data dan informasi yang diupload Perangkat Daerah melalui Sakato Plan, dari 43 Perangkat Daerah (Biro-Biro dihitung menjadi Sekretariat Daerah), baru 29 Perangkat Daerah yang melaksanakan Forum OPD.
 - b. Tingkat Partisipasi Aktif Pemangku Kepentingan pada Konsultasi Publik dan Musrenbang Penyusunan RKPD Tahun 2026 masih rendah.
 - c. Terdapat beberapa target indikator kinerja daerah sampai kondisi triwulan II Tahun 2025 yang tidak tercapai pada beberapa Perangkat Daerah, dimana dari 230 Indikator Kinerja Daerah baru sebanyak 35 Indikator Kinerja Daerah yang tercapai sesuai dengan targetnya.

Dalam hal ini, rencana tindak lanjut yang akan dilakukan adalah sebagai berikut :

- a. Mengingatkan kembali Perangkat Daerah melalui surat edaran perihal pentahapan Penyusunan Rencana Kerja bagi Perangkat Daerah sebagaimana amanah Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 serta menginformasikan pentahapan tersebut pada Perangkat Daerah. Dalam hal ini, jika masih ada Perangkat Daerah yang tidak

melaksanakan Forum OPD, maka Rencana Kerja Perangkat Daerah tersebut tidak akan dibahas.

- b. Berkomitmen untuk menjalankan setiap tahapan penyusunan dokumen perencanaan yang telah dituangkan kedalam Kalender Perencanaan disetiap tahunnya.
 - c. Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan capaian kinerja perangkat daerah dan memberikan rekomendasi tindak lanjut yang harus dilakukan oleh Perangkat Daerah terkait.
 - d. Melibatkan Non State Actor (NSA) dalam pelaksanaan pengendalian rencana yang disusun termasuk dalam pencapaian indikator kinerja pembangunan dalam bentuk FGD.
2. Sasaran Strategis 2 Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Organisasi yang diukur melalui indikator kinerja Nilai Akuntabilitas Kinerja dengan target tahun 2025 sebesar 84,25%. Indikator kinerja ini belum bisa disajikan karena pada saat ini masih dilakukan evaluasi terhadap akuntabilitas kinerja organisasi oleh Inspektorat Provinsi Sumatera Barat.
 3. Sasaran Strategis 3 Meningkatkan Kualitas Pelayanan Organisasi dengan capaian kinerja 94,04%. Capaian kinerja sasaran strategis ini diukur melalui indikator kinerja Tingkat Kepuasan Terhadap Pelayanan Organisasi dengan target tahun 2025 sebesar 98% dan terealisasi sebesar 92,16%.

2.2 Evaluasi Pelaksanaan Renja sampai Triwulan II Tahun 2025

Evaluasi pelaksanaan merupakan salah satu fungsi peningkatan kualitas kinerja instansi pemerintah yang dilaksanakan guna mengetahui program/kegiatan yang tidak memenuhi target, telah memenuhi target ataupun melebihi target kinerja yang direncanakan, sehingga atas dasar evaluasi pelaksanaan tersebut dapat diketahui:

1. Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program/kegiatan;
2. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra Perangkat Daerah;
3. Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut.

Berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan Renja sampai dengan triwulan II Tahun 2025 sebagaimana dimaksud selain untuk mengetahui faktor-faktor penyebab tercapai/tidak tercapai kinerja program, implikasi yang timbul serta tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil, hasil evaluasi dipergunakan untuk penyesuaian/perubahan rencana kerja dan pendanaan Tahun 2025 dengan berpedoman pada Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025.

Hasil evaluasi terhadap pelaksanaan Renja Bappeda Provinsi Sumatera Barat sampai dengan Triwulan II Tahun 2025 dengan pagu dana pada Renja Tahun 2025 sebesar Rp 23.883.955.118,- dan menjadi Rp 16.888.015.718,- pada tahap APBD Tahun 2025 yang dialokasikan untuk pelaksanaan 3 Program, 14 Kegiatan dan 48 Sub Kegiatan dengan realisasi fisik sebesar 49,12% dan realisasi keuangan sebesar Rp 8.350.667.745,- (34,96%) jika dibandingkan dengan pagu Renja, dan sebesar 49,45% jika dibandingkan dengan pagu pada APBD Tahun 2025, sebagaimana tabel 2.2 berikut:

TABEL 2.2 Evaluasi Renja_BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH_TriwulanII_2025

FORMULIR E.55																										
Evaluasi Hasil Terhadap Renja Perangkat Daerah Lingkup Provinsi																										
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH																										
Periode Pelaksanaan : Triwulan II 2025																										
No	Kode	Usran/Bidang Usran Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan(output)		Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2021-2026 (akhir periode Renstra Perangkat Daerah)	Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s/d Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2024)	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (2025) yang dievaluasi	Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi Tahun 2025				Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 (%)	Realisasi Kinerja Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025				Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025 (%)	Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi/Ket	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong	
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)	(6)	(7)	(8)				(12) = 8+9+10+11				(13) = 12/7 * 100%	(14) = 6+12				(15) = 14/5 * 100%	(16)	(17)	(18)	(19)	
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp						
		BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH				541.062.695.468		56.478.778.513		23.883.955.118		3.567.890.643		4.782.777.102		8.350.667.745		34,96		64.829.446.258		11,98				
		URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI				0		0		0		0		0		0		nan		0		nan				
		PENUNJANG URUSAN				0		0		0		0		0		0		nan		0		nan				
		UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN				541.062.695.468		56.478.778.513		23.883.955.118		3.567.890.643		4.782.777.102		8.350.667.745		34,96		64.829.446.258		11,98				
		PERENCANAAN				541.062.695.468		56.478.778.513		23.883.955.118		3.567.890.643		4.782.777.102		8.350.667.745		34,96		64.829.446.258		11,98				
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	Persen	480.984.997.241	400	46.134.169.541	100	17.725.733.803	0	3.461.851.643	50	4.566.928.152	0	0	50	8.028.779.795	50,00	45,29	450	54.162.949.336	inf	11,26			
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase sinkronisasi perencanaan dan pelaksanaan kinerja perangkat daerah	Persen	500	1.859.418.499	400	230.277.250	100	106.436.500	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	400	230.277.250	80,00	12,38				
		5.01.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	10	663.275.160	8	203.249.250	6	56.606.000	1	0	2	0	0	3	50,00	0,00	11	203.249.250	110,00	30,64	BAPPEDA			
		5.01.01.1.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	24	1.127.005.975	16	0	4	14.147.000	4	0	0	0	0	4	0	100,00	0,00	20	0	83,33	0,00	BAPPEDA		
		5.01.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	24	69.137.364	8	27.028.000	4	35.683.500	1	0	0	0	0	1	0	25,00	0,00	9	27.028.000	37,50	39,09	BAPPEDA		
		Rata-rata Capaian Kinerja (%)																								
		Predikat Kinerja																								
		5.01.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Tertib Administrasi Keuangan	Persen	500	437.926.928.285	400	30.968.550.787	100	11.916.378.635	0	2.865.043.438	0	3.713.415.753	0	0	0	6.578.459.191	0,00	55,21	400	37.547.009.978	80,00	8,57	
		5.01.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/ Bulan	591	435.124.178.285	326	30.202.703.337	100	11.640.495.535	75	2.812.723.438	0	3.664.125.753	0	0	75	6.476.849.191	75,00	55,64	401	36.679.552.528	67,85	8,43	BAPPEDA
		5.01.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dokumen	72	2.449.250.000	48	655.408.250	12	236.511.800	3	52.320.000	0	49.290.000	0	6	101.610.000	50,00	42,96	54	757.018.250	75,00	30,91	BAPPEDA	
		5.01.01.1.02.0003	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Laporan	78	353.500.000	52	110.439.200	13	39.371.300	3	0	3	0	6	0	46,15	0,00	58	110.439.200	74,36	31,24	BAPPEDA		
		Rata-rata Capaian Kinerja (%)																								
		Predikat Kinerja																								
		5.01.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Tertib Administrasi Barang Milik Daerah	Persen	500	1.196.191.325	400	307.931.527	100	140.474.900	0	0	0	53.699.620	0	0	0	53.699.620	0,00	38,23	400	361.631.147	80,00	30,23	
		5.01.01.1.03.0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Dokumen	6	593.691.325	4	280.509.527	1	119.400.000	0	0	0	53.699.620	0	0	0	53.699.620	0,00	44,97	4	334.209.147	66,67	56,29	BAPPEDA
		5.01.01.1.03.0004	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan	12	476.250.000	4	4.315.000	2	11.300.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	4	4.315.000	33,33	0,91	BAPPEDA		
		5.01.01.1.03.0005	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan	24	126.250.000	16	23.107.000	4	9.774.900	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	16	23.107.000	66,67	18,30	BAPPEDA		
		Rata-rata Capaian Kinerja (%)																								
		Predikat Kinerja																								
		5.01.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Tertib Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persen	500	2.369.650.000	400	425.647.432	100	447.218.000	0	0	0	1.500.000	0	0	0	1.500.000	0,00	0,34	400	427.147.432	80,00	16,03	
		5.01.01.1.05.0001	Pengadaan Pakelan Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakelan Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	Paket	860	684.900.000	329	179.818.180	168	135.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	329	179.818.180	38,26	26,25	BAPPEDA	
		5.01.01.1.05.0002	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Orang	336	1.088.750.000	80	211.259.500	84	312.218.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	80	211.259.500	23,81	19,40	BAPPEDA		
		5.01.01.1.05.0010	Sosialisai Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Orang	30	293.000.000	1	21.035.352	6	0	0	0	0	0	0	0	0,00	nan	1	21.035.352	3,33	7,18	BAPPEDA		
		5.01.01.1.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Orang	34	303.000.000	3	13.534.400	6	0	0	3	1.500.000	0	3	1.500.000	50,00	inf	6	15.034.400	17,65	4,96	BAPPEDA		
		Rata-rata Capaian Kinerja (%)																								
		Predikat Kinerja																								
		5.01.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Tertib Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persen	500	25.389.092.115	400	7.139.311.455	100	2.877.356.600	0	202.764.154	0	368.319.631	0	0	0	571.083.785	0,00	19,85	400	7.710.395.240	80,00	30,37	
		5.01.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	145	91.000.000	83	72.674.800	24	33.892.500	0	2	0	0	2	8,33	0,00	85	72.674.800	58,62	79,86	BAPPEDA			
		5.01.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	28	1.585.034.856	8	210.268.993	8	0	0	0	0	0	0	0	0,00	nan	8	210.268.993	28,57	13,27	BAPPEDA		
		5.01.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	102	248.441.860	63	518.764.082	17	157.400.000	0	2	0	0	2	11,76	0,00	65	518.764.082	63,73	208,81	BAPPEDA			
		5.01.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	450	18.454.732.832	288	493.213.287	75	114.440.100	0	6	59.932.014	0	6	59.932.014	8,00	52,37	294	553.145.301	65,33	3,00	BAPPEDA		
		5.01.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	60	126.250.000	38	72.147.325	10	0	0	0	2.760.000	0	0	2.760.000	0,00	inf	38	74.907.325	63,33	59,33	BAPPEDA		
		5.01.01.1.06.0006	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	25	3.543.982.577	17	5.033.242.968	4	2.376.624.000	1	115.764.154	0	225.127.617	0	1	340.891.771	25,00	14,34	18	5.374.134.739	72,00	151,64	BAPPEDA	
		5.01.01.1.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Dokumen	24	1.339.650.000	13	703.000.000	1	195.000.000	0	87.000.000	0	0	0	0	85,90	13	906.500.000	54,17	67,67	BAPPEDA			
		Rata-rata Capaian Kinerja (%)																								
		Predikat Kinerja																								
		5.01.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketersediaan Barang Milik Daerah sesuai dengan perencanaan	Persen	500	1.662.270.211	400	1.265.142.000	100	32.076.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	400	1.265.142.000	80,00	76,11			
		5.01.01.1.07.0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Paket	50	547.270.211	31	151.687.000	4	32.076.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	31	151.687.000	62,00	27,72	BAPPEDA		
		5.01.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	22	1.113.455.000	8	1.113.455.000	6	0	0	0	0	0	0	0	0,00	nan	8	1.113.455.000	36,36	99,86	BAPPEDA		
		Rata-rata Capaian Kinerja (%)																								
		Predikat Kinerja																								

2/3

Berdasarkan hasil evaluasi yang dilakukan secara internal sebagaimana terlihat di dalam Tabel 2.2 Evaluasi Hasil terhadap Renja sampai dengan triwulan II Tahun 2025 diatas, faktor penghambat dan tindak lanjut dalam pelaksanaan hasil Renja sampai tahun 2025 adalah sebagai berikut :

1. Hasil evaluasi capaian kinerja program sampai dengan triwulan II :

a. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi.

Indikator yang akan dicapai melalui program ini adalah Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi, dengan target tahun 2025 sebesar 100% dan sampai Juni 2025 terealisasi sebesar 50%. Substansi pada program ini mengakomodir belanja rutin yang menunjang operasional kantor.

b. Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah

Indikator yang akan dicapai melalui program ini adalah Persentase pencapaian sasaran pembangunan sesuai dengan target dan waktu yang ditetapkan dalam dokumen RPJMD Provinsi, dengan target tahun 2025 sebesar 90% dan sampai Juni 2025 terealisasi sebesar 15,22% .

Sesuai dengan definisi operasional dan formula penghitungan atas indikator program yaitu melihat ketercapaian IKU, IKD, Indikator Kinerja Makro dalam RPJMD Provinsi yang tercapai sesuai target dan waktu dengan formula $(\text{Total Capaian IKU, IKD, Indikator Kinerja Makro dalam RPJMD Provinsi yang Tercapai sesuai target dan waktu} / \text{total IKU, IKD, Indikator Kinerja Makro dalam RPJMD Provinsi}) \times 100 \%$, maka setelah dilakukan verifikasi dan validasi data dengan Perangkat Daerah pada tanggal 11 s.d 17 April 2025, dari 230 IKD sudah tercapai sebanyak 35 IKD dan 262 indikator kinerja program telah tercapai sebanyak 36 indikator. Sementara itu, untuk penghitungan IKU dan Indikator Kinerja Makro baru bisa dilakukan pada akhir triwulan IV tahun 2025.

Substansi pada Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah meliputi :

- Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan (RPJMD Tahun 2025-2029, RKPD 2026, P-RKPD 2025, Konsultasi Publik, forum SKPD, Musrenbang).
- Analisis data dan informasi pemerintah bidang perencanaan pembangunan daerah (bahan untuk penyusunan dokumen perencanaan).

- Pengendalian, evaluasi dan pelaporan bidang perencanaan pembangunan daerah (Renja PD, fasilitasi RKPD dan P-RKPD Kab/Kota).
- c. Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah
- Indikator yang akan dicapai melalui program ini adalah Persentase efektivitas sub kegiatan pada RKPD yang mendukung sasaran RPJMD sebagaimana definisi operasional dan formula penghitungan atas indikator program yaitu melihat jumlah sub kegiatan pada RKPD yang mendukung sasaran RPJMD dibandingkan total jumlah sub kegiatan pada RKPD, dengan target tahun 2025 sebesar 80%. Indikator program ini baru bisa diukur pada triwulan III setelah RKPD Tahun 2026 ditetapkan.
- Substansi pada Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah meliputi :
- Koordinasi perencanaan bidang pemerintahan dan pembangunan manusia (koordinasi penyusunan dokumen perencanaan RPJPD, RPJMD, RKPD Bidang pemerintahan dan pembangunan, asistensi penyusunan dokumen perencanaan, monitoring dan evaluasi penyusunan dokumen perencanaan, sinergitas dan harmonisasi perencanaan pembangunan).
 - Koordinasi perencanaan bidang perekonomian dan sumberdaya alam (koordinasi penyusunan dokumen perencanaan RPJPD, RPJMD, RKPD Bidang perekonomian dan sumber daya alam, asistensi penyusunan dokumen perencanaan, monitoring dan evaluasi penyusunan dokumen perencanaan, sinergitas dan harmonisasi perencanaan pembangunan serta Koordinasi Program Unggulan).
 - Koordinasi perencanaan bidang infrastruktur dan kewilayahan (koordinasi penyusunan dokumen perencanaan RPJPD, RPJMD, RKPD Bidang infrastruktur dan kewilayahan, asistensi penyusunan dokumen perencanaan, monitoring dan evaluasi penyusunan dokumen perencanaan, sinergitas dan harmonisasi perencanaan pembangunan).
2. Hasil evaluasi pelaksanaan kegiatan dan sub kegiatan pada Renja sampai dengan triwulan II Tahun 2025 secara rata-rata adalah 96,31% terhadap target kinerja capaian Renstra Bappeda Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021-2026. Dalam hal ini terdapat beberapa faktor yang menghambat masih rendahnya realisasi, diantaranya :

- a. Tertundanya pelaksanaan verifikasi Renja pada 3 bidang yang disebabkan padatnya agenda pembahasan RPJMD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025-2029 dan adanya beberapa perubahan regulasi akibat Intruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2025.
- b. Tertundanya beberapa belanja rutin pada Sekretariat karena adanya perubahan jadwal RUP dan peralihan sistem pengadaan dari e-katalog versi 5 ke e-katalog versi 6.

Dari hasil evaluasi pelaksanaan kegiatan sampai dengan kondisi triwulan II Tahun 2025 dan menindaklanjuti Intruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 yang mengakibatkan dilakukannya pergeseran pada beberapa rekening belanja, maka dilakukan penyempurnaan dan penyesuaian melalui Dokumen Perubahan Rencana Kerja Bappeda Tahun 2025 yang berpedoman pada Dokumen Perubahan RKPD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025. Kebijakan/tindakan serta tindak lanjut perencanaan dan penganggaran yang dilakukan dalam penyusunan Perubahan Rencana Kerja Bappeda Tahun Anggaran 2025 adalah :

1. Menyesuaikan perencanaan dan penganggaran untuk mencapai target kinerja yang sudah ditetapkan.
2. Konsisten melaksanakan SOP tentang pengadministrasian kegiatan dan aliran kas pada masing-masing pelaksanaan kegiatan ke Bagian Keuangan
3. Memprioritaskan Kegiatan Internal dalam Penyusunan RPJMD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025-2029, Penyusunan RKPD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025 dan Penyusunan Rencana Aksi Daerah.

2.3. Analisis Gambaran Kinerja Pelayanan Bappeda

Bappeda Provinsi Sumatera Barat mempunyai Tugas dan Fungsi sebagaimana diatur dalam Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 29 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah, dimana Bappeda mempunyai tugas membantu Gubernur melaksanakan Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan di bidang Perencanaan yang menjadi kewenangan Daerah. Untuk menyelenggarakan tugasnya, Bappeda mempunyai fungsi utama yaitu :

- a. Penyusunan kebijakan teknis di Bidang Perencanaan yang menjadi kewenangan daerah

- b. Pelaksanaan tugas dukungan teknis dibidang perencanaan yang menjadi kewenangan daerah.
- c. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis di bidang perencanaan menjadi kewenangan daerah
- d. Pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi penunjang Urusan Pemerintahan Daerah di bidang Perencanaan menjadi kewenangan daerah
- e. Pelaksanaan Administrasi Badan Perencanaan Pembangunan daerah
- f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Dalam menjalankan tugas dan fungsi tersebut, sesuai dengan amanah Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 perlu dilakukan analisis terhadap kinerja pelayanan Bappeda Provinsi Sumatera Barat yang diukur melalui pencapaian indikator kinerja sasaran sebagaimana yang telah dituangkan kedalam Renstra Bappeda Provinsi Sumatera Barat periode 2021-2026 yang terdiri atas 3 (tiga) indikator sasaran yaitu 1) indeks kualitas perencanaan; 2) Nilai Akuntabilitas Kinerja; dan 3) Tingkat kepuasan terhadap pelayanan internal organisasi. Berikut pada tabel 2.3 dapat dilihat gambaran analisis kinerja Bappeda Provinsi Sumatera Barat berdasarkan Renstra Bappeda Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021-2026 :

Tabel 2.3 Pencapaian Kinerja Pelayanan Bappeda Provinsi Sumatera Barat

No.	Indikator	SPM / Standar Nasional	IKK	Target Renstra				Realisasi			Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2023 (Thn n-2)	Tahun 2024 (Thn n-1)	Tahun 2025 (Thn n)	Tahun 2026 (Thn n+1)	Tahun 2023 (Thn n-2)	Tahun 2024 (Thn n-1)	Tahun 2025 s.d Trw II (Thn n)	Tahun 2026 (Thn n+1)	Tahun 2027 (Thn n+2)	
	Renstra 2021-2026 :												
1	Indeks Kualitas Perencanaan	-	-	77	81	85	89	79,97	94,59	40,77	89	95,97	
2	Nilai Akuntabilitas Kinerja	-	-	79,25	80,25	81,25	82,25	81,73	84,09	Masih tahap evaluasi oleh Inspektorat	82,25	87,88	
3	Tingkat kepuasan terhadap pelayanan internal organisasi	-	-	86,00	87,00	89	91	96,93	100	92,16	91,00	100	

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat capaian kinerja Renstra Bappeda Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021-2026 sampai kondisi Triwulan II Tahun 2025 pada indikator kinerja pertama yaitu “Indeks Kualitas Perencanaan” dengan 3 (tiga) dimensi penilaian yaitu : Proses (30%), Isi (40%) dan Tindak Lanjut (30%) sudah tercapai 40,77% dengan rincian bahwa untuk Dimensi Proses telah tercapai 24,71%, Dimensi Isi terpenuhi 15 % sedangkan untuk Dimensi Tindak Lanjut terpenuhi 1,07%. Untuk Dimensi Isi dan Tindak Lanjut akan berproses sampai akhir Tahun 2025. Capaian indikator kinerja kedua yaitu “Nilai Akuntabilitas Kinerja” yang diukur melalui hasil evaluasi SAKIP oleh Inspektorat pada saat ini masih dalam proses penilaian dan indikator kinerja ketiga yaitu “Tingkat Kepuasan Terhadap Pelayanan Internal Organisasi” dengan realisasi 92,16%.

2.4. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Bappeda

Bappeda Provinsi Sumatera Barat merupakan unsur Organisasi Perangkat Daerah yang mempunyai tugas membantu Gubernur melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan di bidang perencanaan yang menjadi kewenangan daerah. Bappeda memiliki tugas dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang perencanaan pembangunan daerah, serta menyelenggarakan tiga fungsi utama, yaitu penyusunan kebijakan teknis bidang perencanaan; pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis, serta pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang perencanaan pembangunan daerah yang menjadi kewenangan daerah. Disamping itu, Bappeda Provinsi Sumatera Barat juga menjalankan kegiatan mandatori yang dilimpahkan Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah Provinsi dimana Bappeda adalah sebagai leading sektornya.

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya sebagai unsur penunjang Perencanaan sehingga bisa menghasilkan kualitas perencanaan pembangunan yang optimal, Bappeda Provinsi Sumatera Barat bersinergi dengan mitra kerja yang meliputi :

1. Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat
2. DPRD, sebagai mitra dalam pembahasan dan pengesahan dokumen perencanaan dan penganggaran
3. Bappeda Kabupaten/Kota di wilayah Provinsi Sumatera Barat

4. Masyarakat, baik perorangan, kelompok masyarakat dan lembaga swadaya masyarakat.
5. Akademisi, sebagai narasumber dan mitra kajian dalam memberikan masukan pada penyusunan perencanaan pembangunan.

Berdasarkan analisis terhadap capaian kinerja pelayanan Bappeda yang dilakukan dengan saling bersinergi bersama mitra kerja, tentu ada tantangan dan peluang yang dihadapi serta permasalahan-permasalahan dalam pencapaian kinerja pelayanan Bappeda sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dalam urusan penunjang perencanaan, berikut disajikan pemetaan permasalahan yang dihadapi Bappeda Provinsi Sumatera Barat dalam menjalankan tugas dan fungsinya :

**Tabel 2.4 Pemetaan Masalah Pokok, Masalah dan Akar Masalah
Pada Bappeda Provinsi Sumatera Barat**

Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
Kualitas Perencanaan Pembangunan belum optimal sehingga mengakibatkan target pembangunan daerah yang diukur melalui ketercapaian IKU dan IKD dalam dokumen perencanaan belum tercapainya dengan maksimal	Belum optimalnya Proses tahapan perencanaan	Masih rendahnya partisipasi masyarakat dan pemangku kepentingan dalam proses pembangunan menyebabkan persentase rencana kerja pembangunan yang seharusnya mengakomodir masukan dari masyarakat dan pemangku kepentingan berkurang sehingga kualitas perencanaan pembangunan daerah tidak maksimal dan kurang tepat sasaran
		Belum optimalnya pengendalian terhadap tindak lanjut hasil pelaksanaan Musrenbang
	Masih rendahnya kualitas dokumen perencanaan pembangunan daerah	Belum maksimalnya penerapan konsep Tematik, Holistik, Integratif dan Spasial dalam kebijakan perencanaan pembangunan
		Belum optimalnya keselarasan perencanaan pembangunan Daerah dengan Pusat dan Kabupaten/Kota
		Penjenjangan indikator kinerja belum tepat dan belum sepenuhnya dapat mengukur kinerja

Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
		Masih adanya data dan informasi pembangunan yang belum akurat, valid dan mutakhir.
		Masih rendahnya kualitas analisis data dan informasi pembangunan daerah
		Belum optimalnya peningkatan kapasitas kompetensi SDM Fungsional Perencana
	Pengendalian dan evaluasi rencana pembangunan daerah belum optimal	Belum optimalnya mekanisme pengendalian terhadap evaluasi rencana pembangunan
		Evaluasi yang dilakukan belum sepenuhnya sampai kepada outcome dan impact dari pelaksanaan program dan kegiatan
		Keterbatasan data dan informasi yang diberikan oleh Perangkat Daerah tentang kondisi sebenarnya dilapangan

Berdasarkan pada permasalahan yang ada, dalam rangka meningkatkan kinerja Bappeda Provinsi Sumatera Barat di masa yang akan datang, tantangan yang dihadapi adalah :

1. Partisipasi masyarakat dan pemangku kepentingan dalam proses pembangunan masih rendah menyebabkan persentase rencana kerja pembangunan yang seharusnya mengakomodir masukan dari masyarakat dan pemangku kepentingan berkurang sehingga kualitas perencanaan pembangunan daerah tidak maksimal dan kurang tepat sasaran.
2. Menciptakan inovasi pelaksanaan Musrenbang yang efektif yang dapat menyalurkan aspirasi dan kebutuhan masyarakat dari proses Bottom Up, agar memperoleh akses yang cukup memadai dalam kebijakan penganggaran pembangunan.
3. Konsistensi perencanaan selama proses perencanaan dan penganggaran berlangsung pada seluruh Perangkat Daerah memerlukan pendampingan, pengawalan, monitoring dan koordinasi intensif.

4. Penyediaan data dan informasi untuk kebutuhan perencanaan dan evaluasi memerlukan kesamaan pemahaman oleh semua Perangkat Daerah secara berjenjang.
5. Dinamika regulasi dan kebijakan dari Pemerintah Pusat terkait perencanaan pembangunan daerah yang cukup dinamis menuntut sumber daya aparatur Bappeda Provinsi Sumatera Barat agar memiliki kapasitas untuk terus dapat mengikuti dan mengimplementasikan perkembangan regulasi tersebut.
6. Dukungan Perangkat Daerah terhadap pencapaian sasaran Prioritas Pembangunan Daerah dan Program Prioritas Daerah belum optimal.

Sementara itu, terdapat peluang bagi Bappeda Provinsi Sumatera Barat dalam menjalankan tupoksinya untuk meningkatkan kualitas perencanaan, antara lain :

1. Kepedulian dan partisipasi masyarakat baik secara individu, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), Perguruan Tinggi, dan stakeholder lainnya dalam proses perencanaan pembangunan daerah harus dimanfaatkan secara tepat untuk meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan daerah.
2. Dukungan SDM Bappeda Provinsi Sumatera Barat dengan kompetensi dan kualitas personil yang menunjang kinerja organisasi semakin meningkatkan peran Bappeda sebagai perencana dalam menentukan arah pembangunan daerah, sehingga produk perencanaan yang dihasilkan akan menjadi pedoman dalam penyelenggaraan pembangunan daerah.
3. Dukungan sistim informasi berikut pengembangannya dalam penyediaan data dan informasi untuk kebutuhan perencanaan dan evaluasi.
4. Regulasi dan kebijakan yang mendukung perencanaan pembangunan daerah, disamping menjadi tantangan juga menjadi peluang, karena berperan dalam mendorong peningkatan kinerja perencanaan pembangunan daerah.

Dengan menelaah hasil analisis terhadap penyelenggaraan pelayanan berikut permasalahan, tantangan dan peluang yang dihadapi dalam meningkatkan pelayanan Bappeda Provinsi Sumatera Barat, dapat diformulasikan isu-isu strategis yang perlu ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan Bappeda Provinsi Sumatera Barat sebagaimana tabel 2.5 berikut :

Tabel 2.5 Permasalahan dan Isu Strategis

Permasalahan	Isu Strategis
▪ Masih rendahnya partisipasi masyarakat dan pemangku kepentingan dalam proses pembangunan. ▪ Belum optimalnya pengendalian terhadap tindak lanjut hasil pelaksanaan Musrenbang. ▪ Belum maksimalnya penerapan konsep Tematik, Holistik, Integratif dan Spasial dalam kebijakan perencanaan pembangunan. ▪ Belum optimalnya keselarasan perencanaan pembangunan Daerah dengan Pusat dan Kabupaten/Kota. ▪ Penjenjangan indikator kinerja belum tepat dan belum sepenuhnya dapat mengukur kinerja. ▪ Masih adanya data dan informasi pembangunan yang belum akurat, valid dan mutakhir ▪ Masih rendahnya kualitas analisis data dan informasi pembangunan daerah. ▪ Belum optimalnya peningkatan kapasitas kompetensi SDM Fungsional Perencana. ▪ Belum optimalnya mekanisme pengendalian terhadap evaluasi rencana pembangunan. ▪ Evaluasi yang dilakukan belum sepenuhnya sampai kepada outcome dan impact dari pelaksanaan program dan kegiatan. ▪ Keterbatasan data dan informasi yang diberikan oleh Perangkat Daerah tentang kondisi sebenarnya dilapangan	▪ Perencanaan dan Penganggaran yang bersifat imperatif. ▪ Keterlibatan masyarakat dan pemangku kepentingan mulai dari proses perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi terhadap realisasi target perencanaan. ▪ Penerapan konsep Tematik, Holistik, Integratif dan Spasial dalam kebijakan perencanaan pembangunan. ▪ Peningkatan kapasitas SDM Perencana. ▪ Peningkatan kualitas pengendalian dan evaluasi kinerja pembangunan daerah dan perangkat daerah. ▪ Peningkatan pemanfaatan hasil pengendalian dan evaluasi kinerja

2.5. Review Terhadap Rancangan Perubahan RKPD Tahun 2025

Rencana kerja dan pendanaan pada Perubahan Renja Tahun 2025 disusun dengan berpedoman pada Perubahan Rancangan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (P-RKPD) Tahun 2025 dan evaluasi hasil pelaksanaan Renja sampai dengan triwulan II Tahun 2025 dengan melakukan penyesuaian target kinerja dan pagu kegiatan yang didasarkan atas hasil evaluasi serta mengakomodir perkembangan yang terjadi terkait tugas dan fungsi dalam menunjang pencapaian kinerja Perangkat daerah maupun menunjang terwujudnya capaian visi, misi dan tujuan RPJMD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025-2029 dan untuk mendukung prioritas pembangunan daerah.

Bappeda Provinsi Sumatera Barat sebagai salah satu Perangkat Daerah Pemerintah Provinsi Sumatera Barat, telah melakukan review dan analisa kebutuhan terhadap dokumen Perubahan Rancangan RKPD tahun 2025 terkait perubahan target capaian indikator serta perubahan nilai pagu anggaran tahun 2025 yang terdapat pada masing-masing program, kegiatan dan sub kegiatan. Hasil analisa kebutuhan terhadap Perubahan Rancangan RKPD tahun 2025 tercantum sebagaimana pada tabel 2.6 berikut.

Tabel 2.6 Reviu Terhadap Rancangan Perubahan RKPD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025

Kodefikasi				Rancangan Awal Perubahan RKPD								Hasil Analisis Kebutuhan							
				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian Sebelum	Target Capaian Sesudah	Pagu Sebelum (Rp.)	Pagu Sesudah (Rp.)	Bertambah / Berkurang (Rp.)	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian Sebelum	Target Capaian Sesudah	Pagu Sebelum (Rp.)	Pagu Sesudah (Rp.)	Bertambah / Berkurang (Rp.)
1				2	3	4	5		6		7	8	9	10		11		12	
5				UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN							UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN								
5	01			PERENCANAAN					27.738.743.000	16.888.015.718	-10.850.727.282	PERENCANAAN					27.738.743.000	16.888.015.718	-10.850.727.282
5	01	01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH PROVINSI		Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 persen	100 persen	17.918.647.303	15.168.324.968	-2.750.322.335	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH PROVINSI		Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 persen	100 persen	17.918.647.303	15.168.324.968	-2.750.322.335
5	01	01	1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Persentase sinkronisasi perencanaan dan pelaksanaan kinerja perangkat daerah	100%	100%	106.436.500	14.640.000	(91.796.500)	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Persentase sinkronisasi perencanaan dan pelaksanaan kinerja perangkat daerah	100%	100%	106.436.500	14.640.000	(91.796.500)
5	01	01	1.01	01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kota Padang, Padang Barat, Flamboyan Baru	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6 dokumen	6 dokumen	56.606.000	-	(56.606.000)	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kota Padang, Padang Barat, Flamboyan Baru	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6 dokumen	6 dokumen	56.606.000	-	(56.606.000)
5	01	01	1.01	06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kota Padang, Padang Barat, Flamboyan Baru	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4 laporan	4 laporan	14.147.000	-	(14.147.000)	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kota Padang, Padang Barat, Flamboyan Baru	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4 laporan	4 laporan	14.147.000	-	(14.147.000)
5	01	01	1.01	07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kota Padang, Padang Barat, Flamboyan Baru	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 laporan	4 laporan	35.683.500	14.640.000	(21.043.500)	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kota Padang, Padang Barat, Flamboyan Baru	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 laporan	4 laporan	35.683.500	14.640.000	(21.043.500)
5	01	01	1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Persentase Tertib Administrasi Keuangan	100%	100%	11.916.378.635	11.504.770.638	- 411.607.997	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Persentase Tertib Administrasi Keuangan	100%	100%	11.916.378.635	11.504.770.638	- 411.607.997
5	01	01	1.02	01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kota Padang, Padang Barat, Flamboyan Baru	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	100 orang/bulan	100 orang/bulan	11.640.495.535	11.288.050.638	(352.444.897)	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kota Padang, Padang Barat, Flamboyan Baru	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	100 orang/bulan	100 orang/bulan	11.640.495.535	11.288.050.638	(352.444.897)
5	01	01	1.02	02 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kota Padang, Padang Barat, Flamboyan Baru	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	12 Dokumen	236.511.800	216.720.000	(19.791.800)	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kota Padang, Padang Barat, Flamboyan Baru	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	12 Dokumen	236.511.800	216.720.000	(19.791.800)
5	01	01	1.02	07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan /Semesteran SKPD	Kota Padang, Padang Barat, Flamboyan Baru	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	13 Laporan	13 Laporan	39.371.300	-	(39.371.300)	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan /Semesteran SKPD	Kota Padang, Padang Barat, Flamboyan Baru	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	13 Laporan	13 Laporan	39.371.300	-	(39.371.300)
5	01	01	1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		Persentase Tertib Administrasi Barang Milik Daerah	100%	100%	140.474.900	109.759.690	- 30.715.210	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		Persentase Tertib Administrasi Barang Milik Daerah	100%	100%	140.474.900	109.759.690	- 30.715.210
5	01	01	1.03	02 Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Kota Padang, Padang Barat, Flamboyan Baru	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	1 dokumen	1 dokumen	119.400.000	109.759.690	(9.640.310)	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Kota Padang, Padang Barat, Flamboyan Baru	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	1 dokumen	1 dokumen	119.400.000	109.759.690	(9.640.310)

Kodefikasi				Rancangan Awal Perubahan RKPD							Hasil Analisis Kebutuhan														
				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian Sebelum	Target Capaian Sesudah	Pagu Sebelum (Rp.)	Pagu Sesudah (Rp.)	Bertambah / Berkurang (Rp.)	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian Sebelum	Target Capaian Sesudah	Pagu Sebelum (Rp.)	Pagu Sesudah (Rp.)	Bertambah / Berkurang (Rp.)	Catatan Penting					
1				2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12	
5	01	01	1.03	04	Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian Barang Milik Daerah di SIPD		Kota Padang, Padang Barat, Flamboyan Baru	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	2 Laporan	2 Laporan	11.300.000	-	(11.300.000)	Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian Barang Milik Daerah di SIPD	Kota Padang, Padang Barat, Flamboyan Baru	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	2 Laporan	2 Laporan	11.300.000	-	(11.300.000)				
5	01	01	1.03	06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD		Kota Padang, Padang Barat, Flamboyan Baru	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	4 Laporan	4 Laporan	9.774.900	-	(9.774.900)	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Kota Padang, Padang Barat, Flamboyan Baru	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	4 Laporan	4 Laporan	9.774.900	-	(9.774.900)				
5	01	01	1.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			Persentase Tertib Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100%	100%	447.218.000	25.000.000	(422.218.000)	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Persentase Tertib Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100%	100%	447.218.000	25.000.000	(422.218.000)				
5	01	01	1.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya		Kota Padang, Padang Barat, Flamboyan Baru	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	168 Paket	168 Paket	135.000.000	-	(135.000.000)	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Kota Padang, Padang Barat, Flamboyan Baru	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	168 Paket	168 Paket	135.000.000	-	(135.000.000)				
5	01	01	1.05	05	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi		Kota Padang, Padang Barat, Flamboyan Baru	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	84 orang	84 orang	312.218.000	-	(312.218.000)	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Kota Padang, Padang Barat, Flamboyan Baru	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	84 orang	84 orang	312.218.000	-	(312.218.000)				
5	01	01	1.05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan		Kota Padang, Padang Barat, Flamboyan Baru	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	6 orang	6 orang	-	25.000.000	25.000.000	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Kota Padang, Padang Barat, Flamboyan Baru	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	6 orang	6 orang	-	25.000.000	25.000.000				
5	01	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah			Persentase Tertib Administrasi Umum Perangkat Daerah	100%	100%	2.877.356.600	1.508.750.372	(1.368.606.228)	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Persentase Tertib Administrasi Umum Perangkat Daerah	100%	100%	2.877.356.600	1.508.750.372	(1.368.606.228)				
5	01	01	1.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		Kota Padang, Padang Barat, Flamboyan Baru	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	24 Paket	6 Paket	33.892.500	8.480.000	(25.412.500)	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kota Padang, Padang Barat, Flamboyan Baru	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	24 Paket	6 Paket	33.892.500	8.480.000	(25.412.500)				
5	01	01	1.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga		Kota Padang, Padang Barat, Flamboyan Baru	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	17 Paket	7 Paket	157.400.000	7.190.700	(150.209.300)	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kota Padang, Padang Barat, Flamboyan Baru	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	17 Paket	7 Paket	157.400.000	7.190.700	(150.209.300)				
5	01	01	1.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor		Kota Padang, Padang Barat, Flamboyan Baru	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	75 Paket	68 Paket	114.440.100	107.051.354	(7.388.746)	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kota Padang, Padang Barat, Flamboyan Baru	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	75 Paket	68 Paket	114.440.100	107.051.354	(7.388.746)				
5	01	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan		Kota Padang, Padang Barat, Flamboyan Baru	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	10 Paket	9 Paket	-	66.062.000	66.062.000	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kota Padang, Padang Barat, Flamboyan Baru	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	10 Paket	9 Paket	-	66.062.000	66.062.000				
5	01	01	1.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Kota Padang, Padang Barat, Flamboyan Baru	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	4 Laporan	4 Laporan	2.376.624.000	942.966.318	(1.433.657.682)	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kota Padang, Padang Barat, Flamboyan Baru	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	4 Laporan	4 Laporan	2.376.624.000	942.966.318	(1.433.657.682)				
5	01	01	1.06	11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD		Kota Padang, Padang Barat, Flamboyan Baru	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	195.000.000	377.000.000	182.000.000	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Kota Padang, Padang Barat, Flamboyan Baru	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	195.000.000	377.000.000	182.000.000				
5	01	01	1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			Persentase ketersediaan Barang Milik Daerah sesuai dengan perencanaan	100%	100%	32.076.000	-	(32.076.000)	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Persentase ketersediaan Barang Milik Daerah sesuai dengan perencanaan	100%	100%	32.076.000	-	(32.076.000)				
5	01	01	1.07	05	Pengadaan Mebel		Kota Padang, Padang Barat, Flamboyan Baru	Jumlah Mebel yang diadakan	4 paket	10 paket	32.076.000	-	(32.076.000)	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kota Padang, Padang Barat, Flamboyan Baru	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	4 paket	10 paket	32.076.000	-	(32.076.000)				
5	01	01	1.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Kota Padang, Padang Barat, Flamboyan Baru	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	6 unit	17 unit	-	-	-	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kota Padang, Padang Barat, Flamboyan Baru	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	6 unit	17 unit	-	-	-				
5	01	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			Persentase ketersediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	100%	1.715.153.168	1.682.254.268	(32.898.900)	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase ketersediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	100%	1.715.153.168	1.682.254.268	(32.898.900)				
5	01	01	1.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Kota Padang, Padang Barat, Flamboyan Baru	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	4 Laporan	4 Laporan	348.090.000	265.305.000	(82.785.000)	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kota Padang, Padang Barat, Flamboyan Baru	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	4 Laporan	4 Laporan	348.090.000	265.305.000	(82.785.000)				

Kodefikasi				Rancangan Awal Perubahan RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan															
				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian Sebelum	Target Capaian Sesudah	Pagu Sebelum (Rp.)	Pagu Sesudah (Rp.)	Bertambah / Berkurang (Rp.)	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian Sebelum	Target Capaian Sesudah	Pagu Sebelum (Rp.)	Pagu Sesudah (Rp.)	Bertambah / Berkurang (Rp.)	Catatan Penting					
1				2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12	
5	01	01	1.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Kota Padang, Padang Barat, Flamboyan Baru	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	1 Laporan	1.367.063.168	1.416.949.268	49.886.100	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kota Padang, Padang Barat, Flamboyan Baru	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	1 Laporan	1.367.063.168	1.416.949.268	49.886.100				
5	01	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			Persentase Barang Milik Daerah yang berkondisi baik	100%	100%	683.553.500	323.150.000	(360.403.500)	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase Barang Milik Daerah yang berkondisi baik	100%	100%	683.553.500	323.150.000	(360.403.500)				
5	01	01	1.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		Kota Padang, Padang Barat, Flamboyan Baru	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	11 unit	10 unit	362.490.000	216.000.000	(146.490.000)	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kota Padang, Padang Barat, Flamboyan Baru	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	11 unit	10 unit	362.490.000	216.000.000	(146.490.000)				
5	01	01	1.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Kota Padang, Padang Barat, Flamboyan Baru	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	70 unit	42 unit	61.900.000	37.230.000	(24.670.000)	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kota Padang, Padang Barat, Flamboyan Baru	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	70 unit	42 unit	61.900.000	37.230.000	(24.670.000)				
5	01	01	1.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		Kota Padang, Padang Barat, Flamboyan Baru	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 unit	1 unit	199.313.500	24.200.000	(175.113.500)	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kota Padang, Padang Barat, Flamboyan Baru	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 unit	1 unit	199.313.500	24.200.000	(175.113.500)				
5	01	01	1.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Kota Padang, Padang Barat, Flamboyan Baru	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	48 unit	23 unit	59.850.000	45.720.000	(14.130.000)	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kota Padang, Padang Barat, Flamboyan Baru	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	48 unit	23 unit	59.850.000	45.720.000	(14.130.000)				
5	01	02			PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH			Persentase pencapaian sasaran pembangunan sesuai dengan target dan waktu yang ditetapkan dalam dokumen RPJMD Provinsi	92 persen	92 persen	4.061.874.382	931.844.000	-3.130.030.382	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH		Persentase pencapaian sasaran pembangunan sesuai dengan target dan waktu yang ditetapkan dalam dokumen RPJMD Provinsi	92 persen	92 persen	4.061.874.382	931.844.000	-3.130.030.382				
5	01	02	1.01		Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan			Jumlah Dokumen perencanaan dan pendanaan pembangunan daerah yang ditetapkan dengan peraturan	3 dokumen	3 dokumen	2.452.014.382	788.395.000	-1.663.619.382	Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan		Jumlah Dokumen perencanaan dan pendanaan pembangunan daerah yang ditetapkan dengan peraturan	3 dokumen	3 dokumen	2.452.014.382	788.395.000	-1.663.619.382				
5	01	02	1.01	01	Analisis Kondisi Daerah, Permasalahan, dan Isu Strategis Pembangunan Daerah		Kota Padang, Padang Barat, Flamboyan Baru	Jumlah Dokumen Hasil Analisis Kondisi Daerah, Permasalahan, dan Isu Strategis Pembangunan Daerah	3 dokumen	3 dokumen	138.255.000	-	(138.255.000)	Pelaksanaan Konsultasi Publik	Kota Padang, Padang Barat, Flamboyan Baru	Jumlah Berita Acara Konsultasi Publik	3 dokumen	-	138.255.000	-	(138.255.000)				
5	01	02	1.01	03	Pelaksanaan Konsultasi Publik		Kota Padang, Padang Barat, Flamboyan Baru	Jumlah Berita Acara Konsultasi Publik	2 Berita Acara	2 Berita Acara	283.000.000	-	(283.000.000)	Pelaksanaan Konsultasi Publik	Kota Padang, Padang Barat, Flamboyan Baru	Jumlah Berita Acara Konsultasi Publik	2 Berita Acara	-	283.000.000	-	(283.000.000)				
5	01	02	1.01	05	Pelaksanaan Musrenbang Provinsi		Kota Padang, Padang Barat, Flamboyan Baru	Jumlah Berita Acara Musrenbang Provinsi	2 Berita Acara	2 Berita Acara	630.000.000	-	(630.000.000)	Pelaksanaan Musrenbang Provinsi	Kota Padang, Padang Barat, Flamboyan Baru	Jumlah Berita Acara Musrenbang Provinsi	2 Berita Acara	-	630.000.000	-	(630.000.000)				
5	01	02	1.01	06	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi		Kota Padang, Padang Barat, Flamboyan Baru	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi yang Ditetapkan (RP/JP/DP/JPMD/RKPD)	3 Dokumen	3 Dokumen	1.400.759.382	788.395.000	(612.364.382)	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi	Kota Padang, Padang Barat, Flamboyan Baru	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi yang Ditetapkan (RP/JP/DP/JPMD/RKPD)	3 Dokumen	3 Dokumen	1.400.759.382	788.395.000	(612.364.382)				

Kodefikasi				Rancangan Awal Perubahan RKPD								Hasil Analisis Kebutuhan									
				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian Sebelum	Target Capaian Sesudah	Pagu Sebelum (Rp.)	Pagu Sesudah (Rp.)	Bertambah / Berkurang (Rp.)	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian Sebelum	Target Capaian Sesudah	Pagu Sebelum (Rp.)	Pagu Sesudah (Rp.)	Bertambah / Berkurang (Rp.)	Catatan Penting	
1				2	3	4	5		6		7	8	9	10		11		12			
5	01	02	02	Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah		Jumlah Dokumen Data dan Informasi Pemerintahan Daerah	4 dokumen	4 dokumen	383.250.000	72.600.000	(310.650.000)	Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah		Jumlah Dokumen Data dan Informasi Pemerintahan Daerah	4 dokumen	4 dokumen	383.250.000	72.600.000	(310.650.000)		
5	01	02	1.02	01	Kota Padang, Padang Barat, Flamboyan Baru	Jumlah Dokumen Hasil Analisis Data untuk Penyusunan Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah (Semua Perencanaan Pembangunan Daerah)	1 Dokumen	1 Dokumen	204.750.000	72.600.000	(132.150.000)	Analisis Data dan informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Kota Padang, Padang Barat, Flamboyan Baru	Jumlah Dokumen Hasil Analisis Data untuk Penyusunan Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah (Semua Perencanaan Pembangunan Daerah)	1 Dokumen	1 Dokumen	204.750.000	72.600.000	(132.150.000)		
5	01	02	1.02	03	Sumatera Barat	Jumlah Sumber Daya Manusia Pemerintah Kabupaten/Kota yang Dibina dalam Pemanfaatan Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	38 Orang	38 Orang	178.500.000	-	(178.500.000)	Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Sumatera Barat	Jumlah Sumber Daya Manusia Pemerintah Kabupaten/Kota yang Dibina dalam Pemanfaatan Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	38 Orang	-	178.500.000	-	(178.500.000)		
5	01	02	1.03			Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	92 persen	92 persen	1.226.610.000	70.849.000	(1.155.761.000)	Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah		Persentase kesesuaian perencanaan dengan pelaksanaan	92 persen	92 persen	1.226.610.000	70.849.000	(1.155.761.000)		
5	01	02	1.03	01	Kota Padang, Padang Barat, Flamboyan Baru	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan	2 Laporan	2 Laporan	283.500.000	-	(283.500.000)	Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Provinsi	Kota Padang, Padang Barat, Flamboyan Baru	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan	2 Laporan	-	283.500.000	-	(283.500.000)		
5	01	02	1.03	03	Kota Padang, Padang Barat, Flamboyan Baru	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah	3 Laporan	3 Laporan	187.110.000	-	(187.110.000)	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Kota Padang, Padang Barat, Flamboyan Baru	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah	3 Laporan	-	187.110.000	-	(187.110.000)		
5	01	02	1.03	04	Kota Padang, Padang Barat, Flamboyan Baru	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Kabupaten/Kota yang Difasilitasi/Evaluasi	38 Dokumen	38 Dokumen	756.000.000	70.849.000	(685.151.000)	Fasilitasi/Evaluasi Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Kota Padang, Padang Barat, Flamboyan Baru	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Kabupaten/Kota yang Difasilitasi/Evaluasi	38 Dokumen	57 Dokumen	756.000.000	70.849.000	(685.151.000)		
5	01	03				PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase efektivitas sub kegiatan pada RKPD yang mendukung sasaran RPJMD	70 persen	70 persen	5.758.221.315	787.846.750	-4.970.374.565	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH		Persentase efektivitas sub kegiatan pada RKPD yang mendukung sasaran RPJMD	75 persen	75 persen	5.758.221.315	787.846.750	-4.970.374.565	
5	01	03	1.01			Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Jumlah Rancangan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD, RKPD) Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	3 dokumen	3 dokumen	1.131.261.350	353.827.000	- 777.434.350	Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia		Jumlah Rancangan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD, RKPD) Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	3 dokumen	3 dokumen	1.131.261.350	353.827.000	- 777.434.350	
5	01	03	1.01	01	Kota Padang, Padang Barat, Flamboyan Baru	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	3 Dokumen	3 Dokumen	328.888.800	68.700.000	(260.188.800)	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Kota Padang, Padang Barat, Flamboyan Baru	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	3 Dokumen	3 Dokumen	328.888.800	68.700.000	(260.188.800)		
5	01	03	1.01	02	Kota Padang, Padang Barat, Flamboyan Baru	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	3 Laporan	3 Laporan	43.941.700	15.250.000	(28.691.700)	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Kota Padang, Padang Barat, Flamboyan Baru	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	3 Laporan	3 Laporan	43.941.700	15.250.000	(28.691.700)		
5	01	03	1.01	03	Kota Padang, Padang Barat, Flamboyan Baru	Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	1 Laporan	1 Laporan	106.860.750	-	(106.860.750)	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Kota Padang, Padang Barat, Flamboyan Baru	Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	1 Laporan	1 Laporan	106.860.750	-	(106.860.750)		
5	01	03	1.01	04	Kota Padang, Padang Barat, Flamboyan Baru	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pemerintahan	3 Laporan	3 Laporan	60.130.800	23.677.000	(36.453.800)	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan	Kota Padang, Padang Barat, Flamboyan Baru	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pemerintahan	3 Laporan	1 Laporan	60.130.800	23.677.000	(36.453.800)		

Kode	Fikasi	Rancangan Awal Perubahan RKPD								Hasil Analisis Kebutuhan											
		Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian Sebelum	Target Capaian Sesudah	Pagu Sebelum (Rp.)	Pagu Sesudah (Rp.)	Bertambah / Berkurang (Rp.)	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian Sebelum	Target Capaian Sesudah	Pagu Sebelum (Rp.)	Pagu Sesudah (Rp.)	Bertambah / Berkurang (Rp.)	Catatan Penting			
1		2	3	4	5	6			7	8	9	10		11		12					
5	01	03	1.01	05	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Kota Padang, Padang Barat, Flamboyan Baru	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	3 Dokumen	3 Dokumen	165.803.500	76.150.000	(89.653.500)	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Kota Padang, Padang Barat, Flamboyan Baru	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	3 Dokumen	3 Dokumen	165.803.500	76.150.000	(89.653.500)	
5	01	03	1.01	06	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Kota Padang, Padang Barat, Flamboyan Baru	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	3 Laporan	3 Laporan	74.132.000	30.500.000	(43.632.000)	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Kota Padang, Padang Barat, Flamboyan Baru	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	3 Laporan	3 Laporan	74.132.000	30.500.000	(43.632.000)	
5	01	03	1.01	07	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Kota Padang, Padang Barat, Flamboyan Baru	Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	1 Laporan	1 Laporan	129.810.900	-	(129.810.900)	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Kota Padang, Padang Barat, Flamboyan Baru	Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	1 Laporan	1 Laporan	129.810.900	-	(129.810.900)	
5	01	03	1.01	08	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Kota Padang, Padang Barat, Flamboyan Baru	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pembangunan Manusia	3 Laporan	3 Laporan	221.692.900	139.550.000	(82.142.900)	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Kota Padang, Padang Barat, Flamboyan Baru	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pembangunan Manusia	3 Laporan	1 Laporan	221.692.900	139.550.000	(82.142.900)	
5	01	03	1.02		Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)		Jumlah Rancangan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD, RKPD) Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	3 dokumen	3 dokumen	1.582.574.410	178.701.750	(1.403.872.660)	Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)		Jumlah Rancangan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD, RKPD) Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	3 dokumen	3 dokumen	1.582.574.410	178.701.750	(1.403.872.660)	
5	01	03	1.02	01	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Kota Padang, Padang Barat, Flamboyan Baru	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	3 Dokumen	3 Dokumen	500.722.200	62.615.000	(438.107.200)	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Kota Padang, Padang Barat, Flamboyan Baru	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	3 Dokumen	3 Dokumen	500.722.200	62.615.000	(438.107.200)	
5	01	03	1.02	02	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Kota Padang, Padang Barat, Flamboyan Baru	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	3 Laporan	3 Laporan	45.586.100	27.425.500	(18.160.600)	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Kota Padang, Padang Barat, Flamboyan Baru	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	3 Laporan	3 Laporan	45.586.100	27.425.500	(18.160.600)	
5	01	03	1.02	03	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Kota Padang, Padang Barat, Flamboyan Baru	Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	1 Laporan	1 Laporan	143.705.900	-	(143.705.900)	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Kota Padang, Padang Barat, Flamboyan Baru	Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	1 Laporan	1 Laporan	143.705.900	-	(143.705.900)	
5	01	03	1.02	04	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	Kota Padang, Padang Barat, Flamboyan Baru	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Perekonomian	3 Laporan	3 Laporan	136.560.600	19.885.000	(116.675.600)	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	Kota Padang, Padang Barat, Flamboyan Baru	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Perekonomian	3 Laporan	1 Laporan	136.560.600	19.885.000	(116.675.600)	
5	01	03	1.02	05	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Kota Padang, Padang Barat, Flamboyan Baru	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	3 Dokumen	3 Dokumen	455.202.000	11.075.000	(444.127.000)	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Kota Padang, Padang Barat, Flamboyan Baru	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	3 Dokumen	3 Dokumen	455.202.000	11.075.000	(444.127.000)	
5	01	03	1.02	06	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Kota Padang, Padang Barat, Flamboyan Baru	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	3 Laporan	3 Laporan	43.067.509	26.687.500	(16.380.009)	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Kota Padang, Padang Barat, Flamboyan Baru	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	3 Laporan	3 Laporan	43.067.509	26.687.500	(16.380.009)	
5	01	03	1.02	07	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Sumatera Barat	Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	1 Laporan	1 Laporan	182.080.800	-	(182.080.800)	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Sumatera Barat	Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	1 Laporan	1 Laporan	182.080.800	-	(182.080.800)	
5	01	03	1.02	08	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA	Kota Padang, Padang Barat, Flamboyan Baru	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang SDA	3 Laporan	3 Laporan	75.649.301	31.013.750	(44.635.551)	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA	Kota Padang, Padang Barat, Flamboyan Baru	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang SDA	3 Laporan	1 Laporan	75.649.301	31.013.750	(44.635.551)	

Kodefikasi				Rancangan Awal Perubahan RKPD								Hasil Analisis Kebutuhan								
				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian Sebelum	Target Capaian Sesudah	Pagu Sebelum (Rp.)	Pagu Sesudah (Rp.)	Bertambah / Berkurang (Rp.)	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian Sebelum	Target Capaian Sesudah	Pagu Sebelum (Rp.)	Pagu Sesudah (Rp.)	Bertambah / Berkurang (Rp.)	Catatan Penting
1				2	3	4	5		6		7	8	9	10		11		12		
5	01	03	1.03	5.01.03.1.03 Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan		Jumlah Rancangan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD, RKPD) Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	3 dokumen	3 dokumen	3.044.385.555	255.318.000	(2.789.067.555)	5.01.03.1.03 Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan		Jumlah Rancangan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD, RKPD) Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	3 dokumen	3 dokumen	3.044.385.555	255.318.000	(2.789.067.555)	
5	01	03	1.03	01 Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Kota Padang, Padang Barat, Flamboyan Baru	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	3 Dokumen	3 Dokumen	728.323.200	83.425.000	(644.898.200)	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Kota Padang, Padang Barat, Flamboyan Baru	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	3 Dokumen	3 Dokumen	728.323.200	83.425.000	(644.898.200)	
5	01	03	1.03	02 Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Kota Padang, Padang Barat, Flamboyan Baru	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	3 Laporan	3 Laporan	364.161.600	25.028.000	(339.133.600)	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Kota Padang, Padang Barat, Flamboyan Baru	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	3 Laporan	3 Laporan	364.161.600	25.028.000	(339.133.600)	
5	01	03	1.03	03 Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Kota Padang, Padang Barat, Flamboyan Baru	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	1 Laporan	1 Laporan	318.641.400	-	(318.641.400)	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Kota Padang, Padang Barat, Flamboyan Baru	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	1 Laporan	1 Laporan	318.641.400	-	(318.641.400)	
5	01	03	1.03	04 Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	Kota Padang, Padang Barat, Flamboyan Baru	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Infrastruktur	3 Laporan	3 Laporan	82.764.000	11.540.000	(71.224.000)	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	Kota Padang, Padang Barat, Flamboyan Baru	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Infrastruktur	3 Laporan	1 Laporan	82.764.000	11.540.000	(71.224.000)	
5	01	03	1.03	05 Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Sumatera Barat	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	3 Dokumen	3 Dokumen	728.323.200	40.947.000	(687.376.200)	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Sumatera Barat	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	3 Dokumen	3 Dokumen	728.323.200	40.947.000	(687.376.200)	
5	01	03	1.03	07 Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	Kota Padang, Padang Barat, Flamboyan Baru	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	1 Laporan	1 Laporan	227.601.000	-	(227.601.000)	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	Kota Padang, Padang Barat, Flamboyan Baru	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	1 Laporan	1 Laporan	227.601.000	-	(227.601.000)	
5	01	03	1.03	08 Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan	Kota Padang, Padang Barat, Flamboyan Baru	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Kewilayahan	3 Laporan	3 Laporan	594.571.155	94.378.000	(500.193.155)	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan	Kota Padang, Padang Barat, Flamboyan Baru	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Kewilayahan	3 Laporan	1 Laporan	594.571.155	94.378.000	(500.193.155)	

2.6. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Sebagaimana dijelaskan pada lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 86 Tahun 2017, Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat merupakan hasil kajian terhadap program/kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat terkait langsung dengan pelayanan provinsi, LSM, asosiasi-asosiasi, perguruan tinggi maupun dari Perangkat Daerah Kabupaten/Kota serta berdasarkan hasil pengumpulan informasi Perangkat Daerah dari penelitian lapangan dan pengamatan pelaksanaan Konsultasi Publik dan Musrenbang kabupaten/kota yang langsung ditujukan kepada Perangkat Daerah Provinsi.

Untuk Bappeda Provinsi Sumatera Barat, tidak ada usulan program dan kegiatan dari para pemangku kepentingan, mengingat sesuai dengan kedudukan, tugas, dan fungsi Bappeda yang merupakan unsur pelaksana fungsi penunjang urusan pemerintahan di bidang Perencanaan Pembangunan Daerah. Dalam hal ini yang menjadi bentuk pelayanan langsung Bappeda Provinsi Sumatera Barat adalah Organisasi Perangkat Daerah di Lingkungan Provinsi Sumatera Barat dalam proses penyusunan dokumen perencanaan.

**Tabel 2.7 Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan
Tahun 2025 Pada Bappeda Provinsi Sumatera Barat**

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besarn / Volume	Catatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
-	-	-	-	-	-
NIHIL					

Sumber : Bappeda Provinsi Sumatera Barat, Tahun 2025

BAB III

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN

Pada Bab ini diuraikan rencana kerja dan pendanaan pada Perubahan Renja Bappeda Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025 yang disusun dengan berpedoman pada Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (P-RKPD) Tahun 2025, hasil evaluasi kinerja tahun 2024, dan evaluasi hasil pelaksanaan Renja sampai dengan triwulan II Tahun 2025 dengan melakukan penyesuaian target kinerja dan pagu kegiatan (penambahan atau pengurangan) yang didasarkan atas hasil evaluasi serta mengakomodir perkembangan yang terjadi terkait tugas dan fungsi dalam menunjang pencapaian kinerja perangkat daerah sebagaimana yang tertuang di dalam Rancangan Rencana Strategis Bappeda Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025-2029, mendukung prioritas pembangunan daerah, maupun untuk pemenuhan pelayanan Perangkat Daerah dalam menyelenggarakan urusan pemerintah daerah.

3.1 Tujuan dan Sasaran

Bappeda Provinsi Sumatera Barat selaku Perangkat Daerah penunjang urusan pemerintahan bidang perencanaan, sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dalam penyusunan kebijakan teknis bidang perencanaan, pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi penunjang urusan pemerintah daerah di bidang perencanaan, serta melakukan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis di bidang perencanaan melakukan tahapan perencanaan sesuai dengan amanah Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 secara teknokratik, partisipatif, politik, bottom up dan top down dan pendekatan tematik, holistik, integratif, dan spasial dalam rangka mengupayakan terwujudnya perencanaan pembangunan daerah yang berkualitas.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi tersebut, Bappeda Provinsi Sumatera Barat pada Renja Tahun 2025 merumuskan tujuan dan sasaran beserta indikator yang searah dengan strategi arah kebijakan yang tertuang dalam RPJMD 2021-2026 yang selanjutnya dituangkan dalam dokumen Renstra Bappeda Provinsi Sumatera Barat periode tahun 2021-2026 yang dijabarkan dalam target tahunan di dalam dokumen Renja. Pada tahap perubahan Renja tahun 2025, target tujuan dan sasaran Bappeda Provinsi Sumatera Barat yang merupakan tahun ke-4 pada Renstra Bappeda Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021-2026 mengalami perubahan sebagaimana hasil evaluasi capaian kinerja Tahun 2024 dan realisasi kinerja s.d Triwulan II Tahun 2025, dimana realisasi 2 indikator kinerja sasaran telah melebihi target yang dituangkan dalam Renstra Bappeda Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021-2026. Berikut tabel target tujuan dan sasaran pada Perubahan Renja Tahun 2025:

Tabel 3.1.1

Target Tujuan dan Sasaran Perubahan Renja Tahun 2025

No	Tujuan/Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Target RPJMD dan Renstra untuk Tahun 2025	Realisasi Tahun 2024	Target pada Renja 2025	Target pada Perubahan Renja 2025
1.	Tujuan : Terwujudnya Perencanaan Pembangunan Daerah yang berkualitas	Nilai komponen perencanaan kinerja dalam SAKIP Provinsi	26,62	26,09	26,62	26,62
	Sasaran 1 : Meningkatnya kualitas perencanaan	Indeks Kualitas Perencanaan	85	94,59	85	94,61
2.	Tujuan : Meningkatnya Organisasi yang Akuntabel dan Melayani	1. Nilai Akuntabilitas Kinerja	81,25	84,09	84,25	84,25
		2. Tingkat Kepuasan Terhadap Pelayanan Organisasi	89	100	97,25	87
	Sasaran 2.1 : Meningkatnya akuntabilitas kinerja organisasi	Nilai Akuntabilitas Kinerja OPD	81,25	84,09	84,25	84,25
	Sasaran 2.2 : Meningkatnya kualitas pelayanan organisasi	Tingkat Kepuasan Terhadap Pelayanan Organisasi	89	100	97,25	87

Berdasarkan tabel diatas dapat dijelaskan, bahwa terdapat satu target pada Perubahan Renja 2025 yang berada dibawah realisasi tahun sebelumnya yaitu target pada sasaran 3 Tingkat Kepuasan Terhadap Pelayanan Organisasi. Penetapan target tersebut bukan merupakan indikasi penurunan kinerja namun adanya perubahan formula penghitungan indikator sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14

Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik. Penyesuaian formula tersebut bertujuan untuk meningkatkan akurasi pengukuran, memperkuat objektivitas penilaian, serta memastikan keselarasan dengan standar nasional.

3.2 Rencana Kerja dan Pendanaan pada Perubahan Renja Tahun 2025

Berdasarkan hasil dari review dan analisa kebutuhan terhadap target capaian indikator beserta pagu indikatif pada dokumen Rancangan Akhir Perubahan RKPD 2025 serta berdasarkan hasil evaluasi yang telah dilakukan sampai dengan kondisi Triwulan II Tahun 2025, maka pada dokumen Perubahan Renja ini disusun tabel Rumusan Rencana Kerja dan Pendanaan Bappeda Provinsi Sumatera Barat Berdasarkan Perubahan RKPD Tahun 2025 sebesar Rp 16.878.123.718,- sebagaimana pada tabel berikut:

TABEL 3.2 PERUBAHAN RENCANA KERJA SATUAN PERANGKAT DAERAH
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT
TAHUN 2025

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH							23.883.955.118,00	20.326.084.874,00	16.878.123.718,00	-7.005.831.400,00						29.067.461.995,00		
	5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN							23.883.955.118,00	20.326.084.874,00	16.878.123.718,00	-7.005.831.400,00							29.067.461.995,00	
	5.01	PERENCANAAN							23.883.955.118,00	20.326.084.874,00	16.878.123.718,00	-7.005.831.400,00							29.067.461.995,00	
1.	5.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi				100 %	100 %	17.725.733.803,00	17.709.888.374,00	15.158.442.968,00	-2.029.039.808,00							15.696.693.995,00	
	5.01.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase sinkronisasi perencanaan dan pelaksanaan kinerja perangkat daerah				100 %	100 %	106.436.500,00	61.732.000,00	4.758.000,00	-101.678.500,00			-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	Bappeda Provinsi Sumatera Barat		226.710.746,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				6 Dokumen	6 Dokumen	56.606.000,00	26.962.000,00	0,00	-56.606.000,00	Kota Padang, Padang Barat, Flamboyan Baru	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas			162.312.460,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.01.1.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD																		
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				4 Laporan	4 Laporan	14.147.000,00	5.490.000,00	0,00	-14.147.000,00	Kota Padang, Padang Barat, Flamboyan Baru	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas			23.432.798,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																		
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				4 Laporan	4 Laporan	35.683.500,00	29.280.000,00	4.758.000,00	-30.925.500,00	Kota Padang, Padang Barat, Flamboyan Baru	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas			40.965.488,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Tertib Administrasi Keuangan				100 %	100 %	11.916.378.635,00	11.126.535.112,00	11.504.770.638,00	-411.607.997,00			-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	Bappeda Provinsi Sumatera Barat		9.785.108.434,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				100 Orang/ Bulan	100 Orang/ Bulan	11.640.495.535,00	10.894.551.112,00	11.288.050.638,00	-352.444.897,00	Kota Padang, Padang Barat, Flamboyan Baru	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas			9.202.358.434,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN																		
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				12 Dokumen	12 Dokumen	236.511.800,00	216.720.000,00	216.720.000,00	-19.791.800,00	Kota Padang, Padang Barat, Flamboyan Baru	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas			509.250.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.01.1.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD				13 Laporan	13 Laporan	39.371.300,00	15.264.000,00	0,00	-39.371.300,00	Kota Padang, Padang Barat, Flamboyan Baru	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas			73.500.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Tertib Administrasi Barang Milik Daerah				100 %	100 %	140.474.900,00	109.759.690,00	109.759.690,00	-30.715.210,00			-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	Bappeda Provinsi Sumatera Barat		316.674.215,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.01.1.03.0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD																		
			Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	119.400.000,00	109.759.690,00	109.759.690,00	-9.640.310,00	Kota Padang, Padang Barat, Flamboyan Baru	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas			135.549.215,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.01.1.03.0004	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD																		
			Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD				2 Laporan	2 Laporan	11.300.000,00	0,00	0,00	-11.300.000,00	Kota Padang, Padang Barat, Flamboyan Baru	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas			131.250.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.01.1.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD																		
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				4 Laporan	4 Laporan	9.774.900,00	0,00	0,00	-9.774.900,00	Kota Padang, Padang Barat, Flamboyan Baru	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas			49.875.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Tertib Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				100 %	100 %	447.218.000,00	65.000.000,00	25.000.000,00	-422.218.000,00			-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	Bappeda Provinsi Sumatera Barat		580.650.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.01.1.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya																		
			Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan				168 Paket	168 Paket	135.000.000,00	0,00	0,00	-135.000.000,00	Kota Padang, Padang Barat, Flamboyan Baru	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas			144.900.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi																		
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				84 Orang	84 Orang	312.218.000,00	0,00	0,00	-312.218.000,00	Kota Padang, Padang Barat, Flamboyan Baru	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas			309.750.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.01.1.05.0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan				6 Orang	6 Orang	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Padang, Padang Barat, Flamboyan Baru	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas			63.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.01.1.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan																		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				6 Orang	6 Orang	0,00	65.000.000,00	25.000.000,00	25.000.000,00	Kota Padang, Padang Barat, Flamboyan Baru	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas			63.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Tertib Administrasi Umum Perangkat Daerah				100 %	100 %	2.877.356.600,00	3.232.331.464,00	1.508.750.372,00	-1.368.606.228,00			-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	Bappeda Provinsi Sumatera Barat		1.812.441.220,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				24 Paket	6 Paket	33.892.500,00	33.859.500,00	8.480.000,00	-25.412.500,00	Kota Padang, Padang Barat, Flamboyan Baru	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas			21.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				8 Paket	8 Paket	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Padang, Padang Barat, Flamboyan Baru	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas			259.248.914,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga																		
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				17 Paket	7 Paket	157.400.000,00	164.590.700,00	7.190.700,00	-150.209.300,00	Kota Padang, Padang Barat, Flamboyan Baru	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas			57.893.850,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				75 Paket	68 Paket	114.440.100,00	310.688.454,00	107.051.354,00	-7.388.746,00	Kota Padang, Padang Barat, Flamboyan Baru	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas			421.377.079,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				10 Paket	9 Paket	0,00	264.249.600,00	66.062.000,00	66.062.000,00	Kota Padang, Padang Barat, Flamboyan Baru	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas			26.250.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
			<i>Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD</i>				4 Laporan	4 Laporan	2.376.624.000,00	2.081.943.210,00	942.966.318,00	-1.433.657.682,00	Kota Padang, Padang Barat, Flamboyan Baru	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas			740.021.377,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	
	5.01.01.1.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD																			
			<i>Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD</i>				1 Dokumen	1 Dokumen	195.000.000,00	377.000.000,00	377.000.000,00	182.000.000,00	Kota Padang, Padang Barat, Flamboyan Baru	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas			286.650.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	
	5.01.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	<i>Persentase ketersediaan Barang Milik Daerah sesuai dengan perencanaan</i>				100 %	100 %	32.076.000,00	574.590.840,00	0,00	-32.076.000,00			-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	Bappeda Provinsi Sumatera Barat		669.538.261,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	
	5.01.01.1.07.0005	Pengadaan Mebel																			
			<i>Jumlah Paket Mebel yang Disediakan</i>				4 Paket	10 Paket	32.076.000,00	220.834.700,00	0,00	-32.076.000,00	Kota Padang, Padang Barat, Flamboyan Baru	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas			157.500.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	
	5.01.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																			
			<i>Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan</i>				6 Unit	17 Unit	0,00	353.756.140,00	0,00	0,00	Kota Padang, Padang Barat, Flamboyan Baru	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas			512.038.261,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	
	5.01.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	<i>Persentase ketersediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>				100 %	100 %	1.715.153.168,00	1.792.039.268,00	1.682.254.268,00	-32.898.900,00			-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	Bappeda Provinsi Sumatera Barat		1.737.668.869,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	
	5.01.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																			
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan</i>				4 Laporan	4 Laporan	348.090.000,00	371.340.000,00	265.305.000,00	-82.785.000,00	Kota Padang, Padang Barat, Flamboyan Baru	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas			437.724.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	
	5.01.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																			
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan</i>				1 Laporan	1 Laporan	1.367.063.168,00	1.420.699.268,00	1.416.949.268,00	49.886.100,00	Kota Padang, Padang Barat, Flamboyan Baru	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas			1.299.944.869,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	5.01.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang berkondisi baik				100 %	100 %	490.640.000,00	747.900.000,00	323.150.000,00	-167.490.000,00			-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	Bappeda Provinsi Sumatera Barat		567.902.250,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya				11 Unit	10 Unit	362.490.000,00	357.000.000,00	216.000.000,00	-146.490.000,00	Kota Padang, Padang Barat, Flamboyan Baru	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas			244.009.500,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				70 Unit	42 Unit	61.900.000,00	61.750.000,00	37.230.000,00	-24.670.000,00	Kota Padang, Padang Barat, Flamboyan Baru	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas			82.131.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	6.400.000,00	279.800.000,00	45.720.000,00	39.320.000,00	Kota Padang, Padang Barat, Flamboyan Baru	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas			210.261.750,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				48 Unit	23 Unit	59.850.000,00	49.350.000,00	24.200.000,00	-35.650.000,00	Kota Padang, Padang Barat, Flamboyan Baru	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas			31.500.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
2.	5.01.02	PROGRAM PERENCANAAN PENGENDALIAN, DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase pencapaian sasaran pembangunan sesuai dengan target dan waktu yang ditetapkan dalam dokumen RPJMD Provinsi				92 %	92 %	400.000.000,00	1.371.298.000,00	931.834.000,00	4.721.738.000,00							5.121.738.000,00	
	5.01.02.1.01	Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	Jumlah Dokumen perencanaan dan pendanaan pembangunan daerah yang ditetapkan dengan peraturan				3 Dokumen	3 Dokumen	400.000.000,00	1.120.393.000,00	788.392.000,00	388.392.000,00			-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kab/Kota, Stakeholder		2.962.218.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.02.1.01.0001	Analisis Kondisi Daerah, Permasalahan, dan Isu Strategis Pembangunan Daerah																		
			Jumlah Dokumen Rancangan Awal RPJMD/RKPD (Sesuai Kebutuhan jika RPJMD maka Rancangan Teknokratik)				3 Dokumen	3 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Padang, Padang Barat, Flamboyan Baru	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas			146.218.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.02.1.01.0002	Koordinasi Penelaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lainnya																		
			Jumlah Telaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah				1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Padang, Padang Barat, Flamboyan Baru	-	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas			330.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	5.01.02.1.01.0003	Pelaksanaan Konsultasi Publik																		
			Jumlah Berita Acara Konsultasi Publik				2 Berita Acara	2 Berita Acara	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Padang, Padang Barat, Fiamboyan Baru	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas			286.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.02.1.01.0005	Pelaksanaan Musrenbang Provinsi																		
			Jumlah Berita Acara Musrenbang Provinsi				2 Berita Acara	2 Berita Acara	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Padang, Padang Barat, Fiamboyan Baru	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas			660.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.02.1.01.0006	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi yang Ditetapkan (RPJPD/RPJMD/RKPD)				3 Dokumen	3 Dokumen	400.000.000,00	1.120.393.000,00	788.392.000,00	388.392.000,00	Kota Padang, Padang Barat, Fiamboyan Baru	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas			1.540.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.02.1.02	Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Data dan Informasi Pemerintahan Daerah				4 Dokumen	4 Dokumen	0,00	109.200.000,00	72.593.000,00	72.593.000,00			-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kab/Kota, Stakeholder		874.500.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.02.1.02.0001	Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah																		
			Jumlah Dokumen Hasil Analisis Data untuk Penyusunan Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah (Semua Perencanaan Pembangunan Daerah)				1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	109.200.000,00	72.593.000,00	72.593.000,00	Kota Padang, Padang Barat, Fiamboyan Baru	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas			214.500.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.02.1.02.0002	Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Orang yang Dibina dalam Pemanfaatan Data dan Informasi				38 Orang	38 Orang	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Padang, Padang Barat, Fiamboyan Baru	-	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas			198.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.02.1.02.0003	Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Sumber Daya Manusia Pemerintah Kabupaten/Kota yang Dibina dalam Pemanfaatan Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah				38 Orang	38 Orang	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Padang, Padang Barat, Fiamboyan Baru	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas			187.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.02.1.02.0004	Penyusunan Profil Pembangunan Daerah Provinsi																		
			Jumlah Buku Profil Pembangunan Daerah yang Diterbitkan				1 Buku	1 Buku	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Padang, Padang Barat, Fiamboyan Baru	-	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas			275.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	5.01.02.1.03	Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	-				-	-	0,00	141.705.000,00	70.849.000,00	70.849.000,00			-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		1.285.020.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.02.1.03.0001	Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Provinsi																		
			Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan				2 Laporan	2 Laporan	0,00	0,00	0,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Padang, Padang Barat, Flamboyan Baru	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas			297.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.02.1.03.0003	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah																		
			Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah				3 Laporan	3 Laporan	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Padang, Padang Barat, Flamboyan Baru	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas			196.020.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.02.1.03.0004	Fasilitasi/Evaluasi Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Kabupaten/Kota yang Difasilitasi/Evaluasi				38 Dokumen	38 Dokumen	0,00	141.705.000,00	70.849.000,00	70.849.000,00	Kota Padang, Padang Barat, Flamboyan Baru	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas			792.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
3.	5.01.03	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase efektivitas sub kegiatan pada RKPD yang mendukung sasaran RPJMD				70 %	70 %	5.758.221.315,00	1.244.898.500,00	787.846.750,00	2.490.808.685,00							8.249.030.000,00	
	5.01.03.1.01	Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Jumlah Rancangan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD, RKPD) Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia				3 Dokumen	3 Dokumen	1.131.261.350,00	559.845.000,00	353.827.000,00	-777.434.350,00			-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kab/Kota, Stakeholder		2.859.985.295,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.03.1.01.0001	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)				3 Dokumen	3 Dokumen	328.888.800,00	108.550.000,00	68.700.000,00	-260.188.800,00	Kota Padang, Padang Barat, Flamboyan Baru	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas			344.429.280,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.03.1.01.0002	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan																		
			Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan				3 Laporan	3 Laporan	43.941.700,00	30.500.000,00	15.250.000,00	-28.691.700,00	Kota Padang, Padang Barat, Flamboyan Baru	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas			238.355.500,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.03.1.01.0003	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan																		
			Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan				1 Laporan	1 Laporan	106.860.750,00	4.880.000,00	0,00	-106.860.750,00	Kota Padang, Padang Barat, Flamboyan Baru	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas			111.910.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.03.1.01.0004	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
			Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pemerintahan				3 Laporan	3 Laporan	60.130.800,00	47.415.000,00	23.677.000,00	-36.453.800,00	Kota Padang, Padang Barat, Flamboyan Baru	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas			143.013.300,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	
	5.01.03.1.01.0005	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)																			
			Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)				3 Dokumen	3 Dokumen	165.803.500,00	128.300.000,00	76.150.000,00	-89.653.500,00	Kota Padang, Padang Barat, Flamboyan Baru	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas			593.757.800,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	
	5.01.03.1.01.0006	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia																			
			Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia				3 Laporan	3 Laporan	74.132.000,00	61.000.000,00	30.500.000,00	-43.632.000,00	Kota Padang, Padang Barat, Flamboyan Baru	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas			664.296.725,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	
	5.01.03.1.01.0007	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia																			
			Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia				1 Laporan	1 Laporan	129.810.900,00	6.100.000,00	0,00	-129.810.900,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas			269.463.490,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	
	5.01.03.1.01.0008	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia																			
			Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pembangunan Manusia				3 Laporan	3 Laporan	221.692.900,00	173.100.000,00	139.550.000,00	-82.142.900,00	Kota Padang, Padang Barat, Flamboyan Baru	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas			494.759.200,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	
	5.01.03.1.02	Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	Jumlah Rancangan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD, RKPD) Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)				-	3 Dokumen	1.582.574.410,00	321.227.500,00	178.701.750,00	-1.403.872.660,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kab/Kota, Stakeholder		2.195.692.693,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	
	5.01.03.1.02.0001	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)																			
			Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)				3 Dokumen	3 Dokumen	500.722.200,00	77.230.000,00	62.615.000,00	-438.107.200,00	Kota Padang, Padang Barat, Flamboyan Baru	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas			524.382.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	
	5.01.03.1.02.0002	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian																			
			Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian				3 Laporan	3 Laporan	45.586.100,00	54.851.000,00	27.425.500,00	-18.160.600,00	Kota Padang, Padang Barat, Flamboyan Baru	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas			281.259.460,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	
	5.01.03.1.02.0003	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian																			

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
			Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian				1 Laporan	1 Laporan	143.705.900,00	5.924.000,00	0,00	-143.705.900,00	Kota Padang, Padang Barat, Flamboyan Baru	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas			150.602.730,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	
	5.01.03.1.02.0004	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian																			
			Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Perekonomian				3 Laporan	3 Laporan	136.560.600,00	39.570.000,00	19.885.000,00	-116.675.600,00	Kota Padang, Padang Barat, Flamboyan Baru	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas			143.013.300,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	
	5.01.03.1.02.0005	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)																			
			Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)				3 Dokumen	3 Dokumen	455.202.000,00	22.150.000,00	11.075.000,00	-444.127.000,00	Kota Padang, Padang Barat, Flamboyan Baru	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas			476.710.960,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	
	5.01.03.1.02.0006	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA																			
			Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA				3 Laporan	3 Laporan	43.067.509,00	53.375.000,00	26.687.500,00	-16.380.009,00	Kota Padang, Padang Barat, Flamboyan Baru	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas			286.026.570,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	
	5.01.03.1.02.0007	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA																			
			Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA				1 Laporan	1 Laporan	182.080.800,00	6.100.000,00	0,00	-182.080.800,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas			190.684.385,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	
	5.01.03.1.02.0008	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA																			
			Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang SDA				3 Laporan	3 Laporan	75.649.301,00	62.027.500,00	31.013.750,00	-44.635.551,00	Kota Padang, Padang Barat, Flamboyan Baru	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas			143.013.288,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	
	5.01.03.1.03	Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Jumlah Rancangan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD, RKPD) Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan				-	3 Dokumen	3.044.385.555,00	363.826.000,00	255.318.000,00	-2.789.067.555,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kab/Kota, Stakeholder		3.193.352.012,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	
	5.01.03.1.03.0001	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)																			
			Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)				3 Dokumen	3 Dokumen	728.323.200,00	106.550.000,00	83.425.000,00	-644.898.200,00	Kota Padang, Padang Barat, Flamboyan Baru	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas			762.737.540,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	
	5.01.03.1.03.0002	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur																			

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
			<i>Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur</i>				3 Laporan	3 Laporan	364.161.600,00	50.056.000,00	25.028.000,00	-339.133.600,00	Kota Padang, Padang Barat, Flamboyan Baru	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas			381.368.760,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	
	5.01.03.1.03.0003	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur																			
			<i>Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur</i>				1 Laporan	1 Laporan	318.641.400,00	6.950.000,00	0,00	-318.641.400,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas			333.697.600,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	
	5.01.03.1.03.0004	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur																			
			<i>Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Infrastruktur</i>				3 Laporan	3 Laporan	82.764.000,00	23.080.000,00	11.540.000,00	-71.224.000,00	Kota Padang, Padang Barat, Flamboyan Baru	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas			86.674.720,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	
	5.01.03.1.03.0005	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)																			
			<i>Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)</i>				3 Dokumen	3 Dokumen	728.323.200,00	55.694.000,00	40.947.000,00	-687.376.200,00	Kota Padang, Padang Barat, Flamboyan Baru	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas			762.737.530,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	
	5.01.03.1.03.0007	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan																			
			<i>Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan</i>				1 Laporan	1 Laporan	227.601.000,00	3.740.000,00	0,00	-227.601.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas			238.355.480,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	
	5.01.03.1.03.0008	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan																			
			<i>Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Kewilayahan</i>				3 Laporan	3 Laporan	594.571.155,00	117.756.000,00	94.378.000,00	-500.193.155,00	Kota Padang, Padang Barat, Flamboyan Baru	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas			627.780.382,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	
		J U M L A H							23.883.955.118,00	20.326.084.874,00	16.878.123.718,00	-7.005.831.400,00						29.067.461.995,00			

BAB IV

PENUTUP

4.1 Kesimpulan Penting Substansial

Perubahan Renja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025 ini merupakan pedoman dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Bappeda yang dijabarkan ke dalam program dan kegiatan perubahan Tahun 2025, yang mengacu pada sasaran dan prioritas pembangunan daerah, indikator dan target kinerja serta pagu indikatif sebagaimana tercantum dalam Perubahan RKPD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025 untuk menjaga konsistensi capaian kinerja Perangkat Daerah dalam prioritas pembangunan serta untuk menjaga konsistensi antara perencanaan dan penganggaran.

4.2 Kaidah-kaidah Pelaksanaan

Dalam rangka menjaga kesinambungan pencapaian tujuan dan sasaran Perangkat Daerah, ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut:

1. Sekretariat, Bidang-bidang dan seluruh staf Bappeda Provinsi Sumatera Barat secara bersama bertanggungjawab untuk melaksanakan Perubahan Renja Tahun 2025 dengan sebaik-baiknya serta menjaga konsistensi dengan Perubahan RKPD Tahun 2025 dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perubahan Tahun 2025 yang ditetapkan.
2. Pengendalian, pemantauan dan evaluasi kinerja secara berkala terhadap pelaksanaan Perubahan Renja Tahun 2025.

4.3 Rencana Tindak Lanjut

Dengan ditetapkannya Perubahan Renja Tahun 2025, akan ditindaklanjuti dengan penyusunan Perubahan Rencana Kerja Anggaran (P-RKA) dan Perubahan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPPA) untuk mendukung pencapaian kinerja Program dan Kegiatan Bappeda Provinsi Sumatera Barat yang sudah ditetapkan.

GUBERNUR SUMATERA BARAT,


MAHYELDI